

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat.

Beberapa konsep pertumbuhan ekonomi yang relevan, diantaranya adalah Kuznets dalam Jhingan (2000) yang mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai "kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya.(Agusalim, 2015) Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan "*output perkapita*". Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan.(Muttaqin, 2018)

Guna mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan, maka terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yakni : terdapatnya akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, khususnya pertumbuhan angkatan kerja dan terdapatnya kemajuan teknologi. (Todaro, 2008).

Adam Smith ahli ekonomi klasik, menjelaskan bahwa suatu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai faktor pasif sedangkan pertumbuhan output total dianggap sebagai faktor aktif. (Todaro, 2008) Tinggi rendahnya output suatu negara dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu :

- a) Sumber daya alam yang tersedia sebagai komponen yang mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana sumber daya yang tersedia mempunyai keterbatasan dalam pemanfaatan dalam pertumbuhan ekonomi.
- b) Sumber daya manusia (tenaga kerja) sebagai yang berperan pasif dalam proses pertumbuhan output, artinya bahwa jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja.
- c) Jumlah persediaan barang modal sebagai unsur penting dan sangat menentukan seberapa besar tingkat pertumbuhan output.

Lincoln Arsyad (1999) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi regional adalah suatu proses pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Sedangkan Glasson (1997) menyatakan bahwa teori pertumbuhan regional jangka panjang harus memperhitungkan faktor-faktor yang dianalisis dalam jangka pendek yang diasumsikan konstan, seperti penduduk, upah, harga teknologi dan distribusi pendapatan. Mobilitas faktor tenaga kerja dan modal harus menjadi pertimbangan yang sangat penting. Pada umumnya pertumbuhan ekonomi regional dapat terjadi akibat dari faktor endogen dan faktor eksogen daerah tersebut. Faktor produksi tanah, tenaga kerja, dan modal merupakan faktor penentu yang berasal dari dalam daerah (endogen), sedangkan permintaan dari daerah lain atas komoditi daerah tertentu merupakan faktor eksogen dari daerah tersebut. (Todaro, 2008)

Menurut Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor produksi (Sukirno, 1994). Persamaannya adalah :

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

Dimana :

- ΔY = tingkat pertumbuhan ekonomi
- ΔK = tingkat pertambahan barang modal
- ΔL = tingkat pertambahan tenaga kerja
- ΔT = tingkat pertambahan teknologi

Sedangkan dalam model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (*Solow Neo Classical Growth Model*) maka fungsi produksi agregat standar adalah sama seperti yang digunakan dalam persamaan sektor modern Lewis yakni :

$$Y = Ae^{ut} \cdot K^\alpha \cdot L^{1-\alpha}$$

Dimana :

- Y = Produk Domestik Bruto
- K = stok modal fisik dan modal manusia
- L = tenaga kerja non terampil
- A = konstanta yang merefleksikan tingkat teknologi dasar
- e^{ut} = melambangkan tingkat kemajuan teknologi
- α = melambangkan elastisitas output terhadap modal, yakni persentase kenaikan PDB yang bersumber dari 1% penambahan modal fisik dan modal manusia.

Menurut teori pertumbuhan Neo Klasik Tradisional, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 (tiga) faktor yakni kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungan dan investasi) dan penyempurnaan teknologi (Todaro, 2000).

Glasson (1997) menyatakan bahwa teori pertumbuhan regional jangka panjang harus memperhitungkan faktor-faktor yang dianalisis jangka pendek diasumsikan konstan, yakni seperti penduduk, upah, harga, teknologi dan distribusi pendapatan. Mobilitas faktor-faktor terutama tenaga kerja dan modal harus menjadi pertimbangan yang sangat penting. Pada umumnya orang sependapat bahwa pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu endogen maupun eksogen yakni faktor-faktor yang terdapat pada daerah yang bersangkutan ataupun faktor-faktor di luar daerah atau kombinasi dari keduanya. Faktor-faktor penentu penting penting dari dalam daerah meliputi distribusi faktor-faktor seperti tanah, tenaga kerja dan modal, sedangkan salah

satu faktor penentu dari luar daerah yang penting adalah tingkat permintaan dari daerah lain terhadap komoditas yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

Dalam menjelaskan faktor endogen sebagai penentu terjadinya pertumbuhan ekonomi regional dapat dilakukan dengan pendekatan ekonomi makro. Model ini berorientasi pada penawaran dan berusaha menjelaskan output regional menurut faktor-faktor regional tertentu yang masing-masing dapat dianalisa sendiri-sendiri, (Glasson,1997), dan dapat dituliskan sebagai berikut : (Todaro, 2008)

$$O_n = f_n (K, L, Q, Tr, T, So)$$

Keterangan :

O_n = output perusahaan dari daerah n
 K = penggunaan modal
 L = penggunaan tenaga kerja
 Q = tanah
 Tr = sumber daya pengangkutan
 T = Tekhnologi yang digunakan
 So = sistem poilitk

Apabila dirumuskan menurut faktor-faktor yang lebih penting dan lebih mudah dikuantitatifkan, maka rumus persamaan mengenai pertumbuhan dapat dinyatakan sebagai contoh :

$$O_n = a_n k_n + (1 - a_n) l_n + t_n$$

Keterangan :

O, k, l, t = tingkat pertumbuhan output, modal, tenaga kerja dan teknologi
 a = bagian pendapatan yang diperoleh modal (yakni produk marginal dari modal)

Teori pertumbuhan Harrod-Domar dikembangkan oleh dua ekonom sesudah Keynes yaitu Evsey Domar dan Sir Roy F. Harrod. Teori Harrod - Domar ini mempunyai asumsi yaitu : (Oktaviani & Novianti, n.d.)

1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.

2. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.
3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
4. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal - output (*capital - output ratio = COR*) dan rasio pertambahan modal-output (*incremental capital-output ratio = ICOR*).

Adanya pertumbuhan ekonomi yang positif diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat. Perekonomian dianggap memiliki pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Dengan kata lain perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil pada tahun sebelumnya.

Glasson (1997) menyatakan bahwa teori pertumbuhan regional jangka panjang harus memperhitungkan faktor-faktor yang dianalisis dalam jangka pendek yang diasumsikan konstan, seperti penduduk, upah, harga teknologi dan distribusi pendapatan. Mobilitas faktor tenaga kerja dan modal harus menjadi pertimbangan yang sangat penting. Pada umumnya pertumbuhan ekonomi regional dapat terjadi akibat dari faktor endogen dan faktor eksogen daerah tersebut. Faktor produksi tanah, tenaga kerja, dan modal merupakan faktor penentu yang berasal dari dalam daerah (endogen), sedangkan permintaan dari daerah lain atas komoditi daerah tertentu merupakan faktor eksogen dari daerah tersebut. A. Ma'ruf and L. Wihastuti, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan Dan Prospeknya," *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* (Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang) 9, no. 1 (2008): 44-55.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi regional dijelaskan bahwa fungsi produksi agregat merupakan dasar dari model pertumbuhan neoklasik. Hubungan tersebut ditunjukkan dalam bentuk sebagai berikut :

$$Y = F(K, L)$$

Dimana :

Y : Output riil

K : *Capital Stock*

L : Tenaga Kerja.

Dalam bentuk Cobb Douglas dengan asumsi *constant return to scale* yaitu ; (Todaro, 2008)

$$Y = AK^\alpha L^{1-\alpha}, y = Ak^\alpha$$

Dimana : $y = Y/L$ dan $k = K/L$.

Fungsi produksi perkapita menunjukkan bahwa output per pekerja hanya akan meningkat jika modal per pekerja meningkat. Dengan kata lain modal harus terus tumbuh lebih cepat daripada penawaran tenaga kerja dari output per pekerja. Agar lebih realistis maka model neoklasik diatas harus ditambah dengan efek apabila adanya teknologi pada pertumbuhan output.

$$Y = F(A, K, L)$$

dimana :

A : *Technical Knowledge* (teknologi).

K : *Capital Stock*

L : Tenaga Kerja.

Dalam bentuk Cobb-Douglas, $Y = AegtK^\alpha L^{1-\alpha}$, dimana g adalah technical progress per time period t, selanjutnya dengan aplikasi matematika kita jadikan dalam model pertumbuhan, dimana; $\Delta Y/Y$, $\Delta K/K$, dan $\Delta L/L$ adalah given.

Selanjutnya dengan merubah dalam bentuk model region (daerah), dengan g adalah perubahan *rate of technical* dan r notasi untuk regional. Dari bentuk neoklasik diatas, kita dapat mengidentifikasi tiga alasan terjadinya ketidakmerataan pertumbuhan regional yaitu ; (Yuliawan et al., 2013)

1. *Tekhnical progress* berubah diantara region
2. Pertumbuhan kapital stock berubah diantara region
3. Pertumbuhan tenaga kerja berubah diantara region.

Pertumbuhan kapital stok daerah didorong dengan adanya investasi baik dari daerah itu sendiri atau daerah lain. Pertumbuhan tenaga kerja juga didorong oleh adanya migrasi tenaga kerja dari daerah lain karena adanya perbedaan upah relatif terhadap daerah lain disamping akibat tumbuhnya angkatan kerja baru karena pertumbuhan populasi. Selanjutnya, ketidakmerataan regional dalam pertumbuhan output per tenaga kerja dapat dijelaskan oleh perbedaan regional dalam *rate of technical progress* dan oleh perbedaan regional dalam rasio pertumbuhan kapital/tenaga kerja. Untuk pertumbuhan teknologi tentunya juga dipengaruhi oleh masuknya sumberdaya dari daerah lain dan perkembangan pendidikan atau pengetahuan. (Chalid & Yusuf, 2014).

Secara umum, kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah faktor produksi, sedangkan yang menjadi pendorongnya adalah : (Harahap, 2018) :

1. Sumber Daya Alam, yang merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sumber daya alam dimaksud adalah segala sesuatu yang ada di dalam bumi dan diluar bumi, seperti : bumi (tanah), mineral, gunung, hutan, hewan, air, sinar matahari, udara, barang tambang dan lainnya.
2. Modal, merupakan persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi.
3. Kemajuan teknologi, terkait dengan perubahan metode produksi yang mampu memberikan produktifitas yang lebih meningkat.

Dalam kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik.

Pembahasan ini diantaranya berangkat dari firman Allah SWT dalam surat Hud ayat 61:

وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۖ قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

“Dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).”

Ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah SWT menjadikan kita sebagai wakil untuk memakmurkan bumi. Terminologi ‘pemakmuran bumi’ ini mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir : “Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian yang lebih besar dari pada orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran bumi. Barang siapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran bumi, negara tersebut akan hancur. (Muttaqin, 2018)

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia.

Pertumbuhan mencakup sisi yang lebih luas untuk pertumbuhan dan kemajuan aspek materil dan spiritual manusia. Dengan kata lain, pendekatan ini bukan hanya persoalan ekonomi kehidupan (*growth with equity*) atau pertumbuhan itu sendiri (*growth an sich*). Baik pertumbuhan (*growth*) maupun pemerataan (*equity*), dibutuhkan secara simultan. (M. Umer Chapra, 2008)

Dengan demikian, pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral.

Pada sisi lain, Islam juga tetap memandang pentingnya pemerataan, karena pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh, terlebih apabila pendapatan dan faktor produksi banyak terpusat bagi sekelompok kecil masyarakat. Karena itu, teknik dan pendekatan baru yang harus dilakukan dalam pembangunan menurut perspektif ekonomi Islam, adalah bahwa kita harus meninggalkan penggunaan model-model pertumbuhan agregatif yang lebih menekankan maksimalisasi tingkat pertumbuhan sebagai satu-satunya indeks perencanaan pembangunan. Karena itu, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang tinggi, bukan menjadi tujuan utama. Sebab apalah artinya perkapita tinggi, tapi berbeda sama sekali dengan kondisi riil, kemiskinan menggurita dan kesenjangan tetap menganga.

Menurut M. Umer Chapra Untuk mewujudkan pemerataan, setidaknya ada lima unsur utama yang harus dilakukan, yaitu : (Chapra, 2008)

1. Mengadakan pelatihan dan menyediakan lowongan kerja bagi pencari kerja, sehingga terwujud *full employment*.
2. Memberikan sistem upah yang pantas bagi karyawan.
3. Mempersiapkan asuransi wajib untuk mengurangi pengangguran, kecelakaan kerja, tunjangan hari tua dan keuntungan-keuntungan lainnya.
4. Memberikan bantuan kepada mereka yang cacat mental dan fisik, agar mereka hidup layak.
5. Mengumpulkan dan mendayagunakan zakat, infaq, dan sedaqah, melalui undang-undang sebagaimana undang-undang pajak.

Dengan upaya-upaya itu, maka kekayaan tidak terpusat pada orang-orang tertentu. Al-Qur'an dalam surat Al-Hasyr ayat 7 dengan tegas mengatakan,

“kekayaan hendaknya tidak terus-menerus beredar di kalangan orang-orang kaya saja”.

Menurut Al-Tariqi, Islam harus mempunyai karakteristik tersendiri agar tujuan pertumbuhan ekonominya bisa tercapai. Karakteristik tersebut adalah :

1. Komprehensif (*al-Syumul*); Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar persoalan materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporer, yaitu untuk menciptakan keadilan sosial. Pertumbuhan harus berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat.
2. Berimbang (*Tawazun*); Pertumbuhan tidak hanya diorientasikan untuk menciptakan pertambahan produksi, namun ditujukan berlandaskan asas keadilan distribusi sesuai dengan firman Allah : “Berbuat adillah kamu, sesungguhnya hal itu yang paling dekat dengan ketakwaan”. (Q.S. Al-Maidah: 8). Pertumbuhan juga memerlukan adanya keberimbangan usaha-usaha pertumbuhan. Oleh karena itu, Islam tidak menerima langkah kebijakan pertumbuhan perkotaan dengan mengabaikan pedesaan, industri yang mengabaikan pertanian atau dengan mengkonsentrasikan percepatan pembangunan program tertentu dengan mengabaikan sarana umum dan prasarana pokok lainnya.
3. Realistis (*Waqi'iyah*); Realistis adalah suatu pandangan terhadap permasalahan sesuai dengan kenyataan. Dalam teori-teori sosial secara umum, realistis merupakan persyaratan yang harus ada di dalamnya, karena teori yang utopis yang jauh dari kondisi riil akan sulit diterima oleh masyarakat. Islam – yang merupakan agama yang berasal dari Allah – tidak mungkin menetapkan aturan-aturan idealis yang jauh dari kehidupan manusia dan

kemungkinan penerapannya. Realistis Islam adalah idealitas, dan idealitas islam adalah realitas.

4. Keadilan (*'Adalah*), bahwa pertumbuhan harus disertai dengan adanya keadilan distributif. Allah berfirman : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemunkaran dan permusuhan.(Q.S. Al-Nahl: 90). Dari realitas yang ada kita bisa melihat betapa kesenjangan antara yang kaya dan miskin di negeri ini telah sedemikian hebatnya. Realita disparitas ekonomi ini tidak saja terjadi di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, tetapi juga negara-negara maju. Maka disinilah pentingnya pertumbuhan yang disertai dengan pemerataan yang adil.
5. Bertanggung Jawab (*Mas'uliyah*); Ketika Islam memberikan ruang kebebasan terhadap individu dalam bidang apapun dengan ekspresi yang mencerminkan penghormatan kepada manusia untuk menikmati kenikmatan duniawi, maka kebebasan ini tidak diberikan secara absolut tanpa batas. Kebebasan itu dibatasi oleh berbagai aturan yang menunjukkan adanya jaminan kebahagiaan seluruh anggota masyarakat. Karakteristik ini juga berkaitan dengan aspek lain dalam pertumbuhan, yaitu bahwa pertumbuhan harus *sustainable*. Pertumbuhan harus memperhatikan faktor ekologi dengan tidak mengeksploitasi seluruh sumber daya yang ada tanpa memperhatikan kelestariannya.
6. Mencukupi (*Kifayah*); Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik tanggung jawab seperti yang telah diungkapkan, namun tanggung jawab itu haruslah mutlak dan mampu mencakup realisasi kecukupan bagi umat manusia. Dalam hal ini para ahli fikih telah menetapkan dalam bidang pengalokasian harta dengan ukuran yang dapat mencukupi kebutuhan berupa pangan, sandang dan papan dalam batas yang seharusnya.
7. Berfokus pada manusia (*Ghayatuha al-Insan*), Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi

pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan obyek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia. Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya pada persoalan pembangunan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan.

B. Investasi

Dalam ekonomi makro investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran masyarakat untuk memperoleh alat-alat kapital baru, oleh karena itu investasi total yang terjadi di suatu perekonomian sebagian berupa pembelian alat-alat baru untuk menggantikan alat-alat kapital yang tidak ekonomis untuk dipakai lagi dan sebagian lain berupa pembelian alat-alat kapital yang baru untuk memperbesar stock kapital. (Abidin, 2012) Di sisi lain investasi diartikan sebagai pengeluaran dari sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang atau jasa untuk menambah stock barang dan perluasan perusahaan.

Investasi adalah pengeluaran-pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan persediaan barang modal (*capital stock*) terdiri dari pabrik, mesin kantor, dan produk-produk tahan lama lainnya (Dornbusch dan Fischer, 2004), sedangkan menurut Guritno (1998), investasi adalah penambahan barang modal secara netto yang positif.

Berdasarkan jenisnya, investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : (Eliza, 2015)

1. Investasi riil, adalah investasi terhadap barang-barang tahan lama (barang-barang modal) yang akan digunakan dalam proses produksi.
2. Investasi finansial, adalah investasi terhadap surat-surat berharga, misalnya pembelian saham, obligasi, dan surat bukti hutang lainnya.

Pertimbangan-pertimbangan utama yang perlu dilakukan dalam melakukan (memilih) suatu jenis investasi riil adalah tingkat bunga pinjaman yang berlaku, tingkat pengembalian (rate or return), dari barang modal, dan prospek (harapan berkembang) proyek investasi (Guritno, 1998: 81).

Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam GNP dan dalam permintaan agregat. Pertama bahwa pengeluaran investasi lebih tidak stabil apabila dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi sehingga fluktuasi investasi dapat menyebabkan resesi. Kedua, bahwa investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta perbaikan dalam produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada tenaga kerja dan jumlah stock kapital (Eni Setyowati dan Siti Fatimah N., 2007).(Syukri & Hinaya, 2019)

Sedangkan Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh para penanam modal yang menyangkut penggunaan sumber-sumber seperti peralatan, gedung, peralatan produksi dan mesin-mesin baru lainnya atau persediaan yang diharapkan akan memberikan keuntungan dari investasi tersebut. Kekuatan ekonomi utama yang menentukan investasi adalah hasil biaya investasi yang ditentukan oleh kebijakan tingkat bunga dan pajak, serta harapan mengenai masa depan (Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, 1998).(Eliza, 2015)

Pengertian investasi menurut Komarudin (1983) :

- a. Suatu tindakan membeli barang-barang modal
- b. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang
- c. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya.

Investasi menghimpun akumulasi modal dengan membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna bagi kegiatan produktif, maka output potensial suatu bangsa akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang

juga akan meningkat. Jelas dengan demikian bahwa investasi memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah output dan pendapatan.

Adam Smith menyatakan bahwa investasi dilakukan karena para pemilik modal mengharapkan untung dan harapan masa depan keuntungan bergantung pada iklim investasi pada hari ini dan pada keuntungan nyata. Smith yakin keuntungan cenderung menurun dengan adanya kemajuan ekonomi. Pada waktu laju pemupukan modal meningkat, persaingan yang meningkat antar pemilik modal akan menaikkan upah dan sebaliknya menurunkan keuntungan. (Agung et al., 2015)

Investasi otonom adalah investasi yang bebas dilakukan tanpa terpengaruh atau terdorong oleh faktor lainnya. Umumnya jenis investasi ini dilakukan oleh Pemerintah dengan maksud sebagai landasan pertumbuhan ekonomi berikutnya, misalnya investasi untuk pembuatan jalan-jalan, jembatan-jembatan dan infrastruktur lainnya. Sedangkan investasi yang terdorong adalah investasi yang dilakukan sebagai akibat kenaikan permintaan atau dorongan pemerintah. Dengan demikian investasi otonom dan investasi yang terdorong adalah saling mendukung satu sama lain. Dengan investasi otonom diharapkan akan meningkatkan permintaan, yang pada gilirannya akan mendorong investasi. (Agung et al., 2015)

Beberapa jenis investasi digolongkan *public investment* dan *private investment*, *domestic investment* dan *foreign investment*, *gross investment* dan *net investment*. *Public investment* adalah investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan sifatnya resmi. Sedangkan *private investment* adalah investasi yang dilaksanakan oleh pihak swasta. Perbedaan antara investasi pemerintah dan investasi swasta adalah, bahwa dalam investasi swasta keuntungan menjadi prioritas utama, sedangkan investasi pemerintah adalah untuk melayani dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat banyak.

Domestic investment adalah penanaman modal dalam negeri, sedangkan *foreign investment* adalah penanaman modal asing. *Gross investment* adalah total

seluruh investasi yang dilaksanakan pada suatu waktu, baik itu *autonomous* maupun *induced* atau *private* maupun *public*. Sedangkan *net investment* adalah selisih antara investasi bruto dengan penyusutan. (Barimbing & Karmini, 2015)

Para pelaku investasi adalah Pemerintah, swasta, dan kerjasama Pemerintah – swasta. Investasi Pemerintah umumnya dilakukan tidak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada umumnya swasta tidak tertarik pada investasi ini, karena memerlukan biaya yang sangat besar dan tidak memberikan keuntungan secara langsung, melainkan secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama (Brata, 2005). Pihak swasta lebih tertarik pada jenis investasi yang ditujukan untuk memperoleh laba, yang biasanya terdorong oleh karena adanya penambahan pendapatan.

Dornbusch & Fischer berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa mendatang persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu negara menurut Todaro (1981) adalah :

1. Akumulasi modal, termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia;
2. Perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya;
3. Kemajuan teknologi. Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk (output) dan pendapatan di kemudian hari.

Untuk membangun itu seyogyanya, mengalihkan sumber-sumber dari arus konsumsi dan kemudian mengalihkannya untuk investasi dalam bentuk "*capital formation*" untuk mencapai tingkat produksi yang lebih besar. Investasi di bidang pengembangan sumberdaya manusia akan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia, sehingga menjadi tenaga ahli yang terampil yang dapat memperlancar kegiatan produktif.

Menurut Sadono Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni :

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja;
2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi;
3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Suryana (2000) menyatakan bahwa kekurangan modal dalam negara berkembang dapat dilihat dari beberapa sudut :

1. Kecilnya jumlah mutlak kapital material;
2. Terbatasnya kapasitas dan keahlian penduduk;
3. Rendahnya investasi netto. Akibat keterbatasan tersebut, negara-negara berkembang mempunyai sumber alam yang belum dikembangkan dan sumber daya manusia yang masih potensial.

Oleh karena itu untuk meningkatkan produktivitas maka perlu mempercepat investasi baru dalam barang-barang modal fisik dan pengembangan sumberdaya manusia melalui investasi di bidang pendidikan dan pelatihan. Hal ini sejalan dengan teori perangkap kemiskinan (*vicious circle*) yang berpendapat bahwa :

1. Ketidakmampuan untuk mengarahkan tabungan yang cukup
2. Kurangnya perangsang untuk melakukan penanaman modal

3. Taraf pendidikan, pengetahuan dan kemahiran yang relatif rendah merupakan tiga faktor utama yang menghambat terciptanya pembentukan modal di negara berkembang.

Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa model pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori Keynes. Teori tersebut menitikberatkan pada peranan tabungan dan industri sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah (Lincoln Arsyad, 1997). Beberapa asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah bahwa :

1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh.
2. Dalam perekonomian dua sektor (Rumah Tangga dan Perusahaan) berarti sektor pemerintah dan perdagangan tidak ada
3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik original (nol)
4. Kecenderungan untuk menabung (*Marginal Propensity to Save =MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antar modal dan output (*Capital Output Ratio = COR*) dan rasio penambahan modal-output (*Incremental Capital Output Ratio*)

Teori ini memiliki kelemahan yakni kecenderungan menabung dan ratio pertambahan modal-output dalam kenyataannya selalu berubah dalam jangka panjang. Demikian pula proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tidak konstan, harga selalu berubah dan suku bunga dapat berubah akan mempengaruhi investasi. Dalam model pertumbuhan endogen dikatakan bahwa hasil investasi akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin besar. Dengan diasumsikan bahwa investasi swasta dan publik di bidang sumberdaya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternalitas positif) dan memacu produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan ilmiah penurunan skala hasil. Meskipun teknologi tetap diakui memainkan peranan yang sangat penting,

namun model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa teknologi tersebut tidak perlu ditonjolkan untuk menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Implikasi yang menarik dari teori ini adalah mampu menjelaskan potensi keuntungan dari investasi komplementer (*complementary investment*) dalam modal atau sumberdaya manusia, sarana prasarana infrastruktur atau kegiatan penelitian. Mengingat investasi komplementer akan menghasilkan manfaat personal maupun sosial, maka pemerintah berpeluang untuk memperbaiki efisiensi alokasi sumberdaya domestik dengan cara menyediakan berbagai macam barang publik (sarana infrastruktur) atau aktif mendorong investasi swasta dalam industri padat teknologi dimana sumberdaya manusia diakumulaskannya. Dengan demikian model ini menganjurkan keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam pengelolaan investasi baik langsung maupun tidak langsung.

Investasi swasta di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No.12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berdasarkan sumber dan kepemilikan modal, maka investasi swasta dibagi menjadi penanaman modal dalam negeri dan asing. Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumberdaya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB.

Investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya. Investasi merupakan bagian dari fikih muamalah, maka berlaku kaidah “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Djazuli. A 2006). Aturan ini dibuat karena ajaran Islam menjaga hak semua pihak dan menghindari saling menzalimi satu sama lain. Hal ini menuntut para investor untuk mengetahui batasan- batasan dan aturan investasi

dalam Islam, baik dari sisi proses, tujuan, dan objek dan dampak investasinya. Namun demikian, tidak semua jenis investasi diperbolehkan syariah seperti kasus bisnis yang diungkapkan di atas yaitu mengandung penipuan dan kebohongan atau mengandung unsur-unsur kegiatan yang dilarang syariat Islam. (Pardiansyah, 2017)

Kegiatan investasi memiliki manfaat dan dampak yang luas bagi perekonomian suatu negara. Namun demikian, secara prinsip, Islam memberikan panduan dan batasan yang jelas mengenai sektor mana saja yang boleh dan tidak boleh dimasuki investasi. Tidak semua investasi yang diakui hukum positif, diakui pula oleh syariat Islam. Oleh sebab itu, agar investasi tersebut tidak bertentangan, maka harus memperhatikan dan memperhitungkan berbagai aspek, sehingga hasil yang didapat sesuai dengan prinsip syariah.

Berikut ini adalah beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut perspektif Islam (Chair 2015) : (Pardiansyah, 2017)

- a. Aspek material atau finansial. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
- b. Aspek kehalalan. Artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang subhat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku destruktif (*darūrah*) secara individu maupun sosial.
- c. Aspek sosial dan lingkungan. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
- d. Aspek pengharapan kepada rida Allah. Artinya suatu bentuk investasi tertentu dipilih adalah dalam rangka mencapai rida Allah.

Firman Allah SWT dalam surat al-Hasyr (59) ayat 7 :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya “Supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian”. Oleh sebab itu dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi adalah Al-Qur’an dan hadis Nabi saw. Selain itu, karena investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi (muamalah māliyah), sehingga berlaku kaidah fikih, muamalah, yaitu “pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Disamping itu, dalil-dalil dalam Al-Qur’an terkait dengan investasi termaktub dalam : (Pardiansyah, 2017)

1) Al-Baqarah (2) ayat 268

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ
وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.

Ayat ini secara implisit memberikan informasi akan pentingnya berinvestasi, dimana ayat itu menyampaikan betapa beruntungnya orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Orang yang kaya secara finansial (keuangan) kemudian menginfakkan hartanya untuk pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu melalui usaha produktif, maka sesungguhnya dia sudah menolong ribuan, bahkan ratusan ribu orang miskin untuk berproduktif ke arah yang lebih baik lagi.

2) Al-Nisa (4) ayat 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

Ayat ini dengan tegas memerintahkan kepada manusia untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik lemah moril maupun materil. Secara tersirat ayat ini memerintahkan kepada umat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi melalui investasi jangka panjang. Investasi ini akan diwariskan kepada keturunannya untuk mencukupi kehidupan sampai ia layak berusaha sendiri/mandiri.

3) Yusuf (12) ayat 47-49

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُّوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا
قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا
تُحْصِنُونَ

□ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ

Artinya : “Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.

Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).”

Pelajaran (ibrah) dan hikmah dari ayat ini adalah bahwa manusia harus mampu menyimpan sebagian hartanya untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga di kemudian hari. Artinya manusia hanya bisa berasumsi dan menduga yang akan terjadi hari esok, sedangkan secara pastinya hanya Allah yang Mahatahu. Oleh sebab itu, perintah Nabi Yusuf AS. dalam ayat di atas untuk menyimpan sebagian sebagai cadangan konsumsi di kemudian hari.

4) Al-Hasyr (59) ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*

Ayat ini secara eksplisit memerintahkan manusia untuk selalu berinvestasi baik dalam bentuk ibadah maupun kegiatan muamalah māliyah untuk bekalnya di akhirat nanti. Investasi adalah bagian dari muamalah māliyah, sehingga kegiatannya mengandung pahala dan bernilai ibadah bila diniatkan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah

5) Luqman (31) ayat 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ □

Artinya : *“Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui”*.

Maksud dari ayat ini adalah, manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berdoa, berikhtiar dan bertawakal. Salah satu ikhtiar manusia dalam mendayagunakan hartanya dengan cara berinvestasi sesuai prinsip syariah.

Investasi merupakan bagian dari fikih muamalah, maka berlaku kaidah “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Djazuli. A 2006). Aturan ini dibuat karena ajaran Islam menjaga hak semua pihak dan menghindari saling menzalimi satu sama lain. Hal ini menuntut para investor untuk mengetahui batasan- batasan dan aturan investasi dalam Islam, baik dari sisi proses, tujuan, dan objek dan dampak investasinya. Namun demikian, tidak semua jenis investasi diperbolehkan syariah seperti kasus bisnis yang diungkapkan di atas yaitu mengandung penipuan dan kebohongan atau mengandung unsur-unsur kegiatan yang dilarang syariat Islam.

Berdasarkan uraian ayat-ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Islam memandang investasi sebagai hal yang sangat penting sebagai langkah antisipatif terhadap kejadian di masa depan. Seruan bagi orang-orang yang beriman untuk mempersiapkan diri (antisipasi) di hari esok mengindikasikan bahwa segala sesuatunya harus disiapkan dengan penuh perhitungan dan kecermatan. Dalam perspektif ekonomi, hari esok dalam ayat-ayat di atas bisa dimaknai sebagai masa depan (*future*).

Beberapa prinsip syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi (Aziz 2010), yaitu :

- a. Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya (objeknya) maupun prosesnya (memperoleh, mengolah dan medistribusikan), serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram;
- b. Tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi (*la tazlimūn wa lā tuẓlamūn*);
- c. Keadilan pendistribusian pendapatan;

- d. Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida ('an-tarāḍin) tanpa ada paksaan;
- e. Tidak ada unsur riba, maysīr (perjudian), gharar (ketidakjelasan), tadrīs (penipuan), ḍarar (kerusakan/ kemudharatan) dan tidak mengandung maksiat.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan investasi tapi bukan semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Aturan-aturan di atas menetapkan batasan-batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat. Semua transaksi yang terjadi di bursa efek misalnya harus atas dasar suka sama suka, harus jelas dan transparan, informasi antar pihak harus seimbang, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang dizalimi atau menzalimi, tidak ada unsur riba, unsur spekulatif atau judi (maysīr), haram jika ada unsur insider trading (Aziz 2010).

Inilah beberapa yang perlu dipatuhi para investor agar harta yang diinvestasikan mendapatkan berkah dari Allah, bermanfaat bagi orang banyak sehingga mencapai falāh (sejahtera lahir- batin) di dunia juga di akhirat. Prinsip-prinsip di atas merupakan saripati dari sumber rujukan utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah nabi Muhammad SAW, yang kemudian dielaborasi oleh para ulama agar mudah difahami dan diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.

C. Islamic Human Development Index (IHDI)

IHDI dibangun berdasarkan pada indikator-indikator yang mencerminkan dari kelima dimensi Maqshid Syari'ah yang disusun dari seluruh dimensi pemeliharaan kebutuhan dasar manusia. Dimensi tersebut adalah pemeliharaan terhadap agama (*hifdzu ad-dien*), pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdzu an-nafs*), pemeliharaan terhadap akal (*hifdzu al-'aql*), pemeliharaan terhadap keturunan (*hifdzu an-nasl*), dan pemeliharaan terhadap harta (*hifdzu al-māl*). (Moh.Toriquddin, 2013) Kebutuhan dasar manusia tersebut mutlak harus dipenuhi

secara menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan dari kelima dimensi tersebut sehingga tujuan dari pembangunan manusia seutuhnya tercapai atau dalam ekonomi Islam biasa dikenal dengan *falah*. (Fauzia, 2018)

Tabel 2.1. Indikator Yang Diusulkan Dalam Kesejahteraan Holistik

Kesejahteraan	Dimensi	Indeks Dimensi	Indikator Usulan
Kesejahteraan Mataerial Indeks (WMI)	<i>Hifz Mal</i>	<i>Indeks Māl</i>	1. Pengeluaran Perkapita 2. Rasio Gini 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2)
Kesejahteraan Non-Mataerial Indeks (WNMI)	<i>Hifz Din</i>	<i>Indeks Din</i>	1. Angka Kriminalitas
	<i>Hifz 'Aqll</i>	<i>Indeks 'Aql</i>	1. Harapan Lama Sekolah 2. Rata-rata Lama Sekolah
	<i>Hifz Nafs</i>	<i>Indeks Nafs</i>	1. Angka Harapan Hidup
	<i>Hifz Nasl</i>	<i>Indeks Nasl</i>	1. Angka Kelahiran Total 2. Angka Kematian Bayi

Sumber : MB.Hendri Anto, 2009. *Introduction an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Developmen in OIC Countries*, disesuaikan.

Dalam pengukuran Index Pembangunan Manusia Islami (I-HDI), Hendri Anto MB (2010) menyebutkan bahwa secara umum menambahkan aspek pencapaian index tersebut dari pendekatan Maqhasid Syariah Al-Ghazali.(Anto, 2011)

Dari kelima dimensi tersebut maka disusunlah indeks dari masing-masing indikator yang mewakili. Indeks ad-din yang mewakili dimensi agama, index an-nafs yang mewakili dimensi umur panjang dan sehat, index al-'aql yang mewakili dimensi pengetahuan, index an-nasl yang mewakili dimensi keluarga dan keturunan, dan index al-māl yang mewakili dimensi pendapatan. Kelima indeks yang diusulkan tersebut digunakan untuk mengukur dari kelima dimensi Maqāsid Syarī'ah. Nilai dari kelima indeks yang telah diusulkan di atas akan di hitung berdasarkan pada indikator-indikator yang mencerminkan dari masing-masing dimensi Maqāsid Syarī'ah.

1. *Hifdzu Ad-Din* (Perlindungan Agama)

Perlindungan terhadap agama atau iman, memiliki arti bahwa pemikiran dan aktifitas perekonomian berasal dari iman terhadap Allah, hari akhir dan amal shalih. Konsekuensi beriman kepada Allah SWT ialah kemantapan hati bahwasannya Allah SWT ialah Pencipta serta Pemilik alam semesta oleh karena itu Allah SWT ialah sumber rezeki. Didalam hal ini, Allah SWT memerintahkan supaya seusai shalat selesai, sebaiknya manusia menyebar ke seluruh bumi untuk mencari rezeki, tetapi dengan cara yang halal, yaitu dengan jalan mengikuti petunjuk Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. (Rahardo, 2013)

Konsekuensi dari beriman pada Allah SWT yakni kemantapan hati bahwasannya Allah SWT ialah pencipta serta pemilik alam semesta sehingga Allah sumber rezeki. Dalam hal ini, Allah memerintahkan agar setelah shalat selesai, pertanyaan manusia akan menyebar ke seluruh bumi mencari rezeki, tetapi dengan cara yang halal, yaitu dengan jalan menuruti petunjuk Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Kebebasan dan hak dalam Islam memiliki konsekuensi untuk memunculkan keyakinan dan melaksanakan ibadah secara bebas, pemeluk agama memiliki hak terhadap agama dan Mazhab yang diyakininya, tidak bisa diintimidasi agar berpindah dari keyakinan asalnya untuk memeluk Islam. (Nizar, 2016)

Dasar hal ini jelas tertulis didalam kalam Allah didalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 256 dan surat Yunus (10) ayat 99, sebagai berikut :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya : *“Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.” (Q.S. Al-Baqarah/2:256, n.d.)*

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya : “Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman ?” (Q.S. Yunus/10:99, n.d.)

Islam dalam kitab sucinya Al-Qur’an, tidak memperbolehkan segala hal yang berbentuk pemaksaan, karena jika Allah SWT memberikan petunjuk, maka mata hatinya akan dibuka untuk memeluk agama Islam dengan pembuktian dan *hujjah*. Sebaliknya, jika Allah SWT menghendaki hatinya tertutup, penglihatan dan pendengarannya ditutup, maka tidak bergunanya masuk Islam dalam kondisi dipaksa.

Dalam mempertahankan agama, salah satu bentuk kepedulian seseorang dapat tercermin dari pelaksanaan amar ma’ruf nahi munkar dalam menegakkan Islam. Berikut berdasarkan kalam Allah didalam al-Qur’an Surat Ali-Imran (3) ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Ali Imran/3:104, n.d.)

Indeks agama diukur dengan menggunakan indikator yang merupakan visi, komitmen dan implementasi ajaran Islam dalam perspektif holistik dalam masyarakat, misalnya, jumlah atau persentase orang yang melakukan haji, melakukan shalat (di masjid), membayar zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf, melakukan puasa, dan lain sebagainya yang disebut ibadah mahdah. Selain itu, indeks religiusitas idealnya harus menunjukkan perilaku nyata masyarakat mengenai nilai-nilai dan norma Islam yang disebut dengan ibadah ghoiru mahdah.

Kebebasan dan hak dalam Islam memiliki konsekuensi kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan

mazhab yang diyakininya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh dipaksa untuk berpindah dari keyakinan asalnya untuk memeluk Islam.

2. *Hifdzu An-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Melindungi jiwa dalam bentuk memelihara kehidupan dalam Islam sangat dianjurkan, sesuai kalam Allah SWT di beberapa Al-Qur'an yang mengecam keras seseorang yang tidak menjaga dirinya dengan baik atau menyia-nyiaikan hidup yang dijalani. Nurhayati, "Fikih Minoritas : Suatu Kajian Teoritis."

Dalam QS. an-Nisa (4) ayat 29, firman Allah :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu."* (Q.S. An Nisa/4:29, n.d.)

Konsekuensi dari aspek perlindungan terhadap jiwa adalah bahwa seluruh kegiatan dan aktifitas haruslah menjaga jiwa insan dan menjauhi berbagai aktifitas yang dapat mengancam keselamatan seseorang, seperti pembuatan energi nuklir, berbagai obat-obatan dan makanan yang memberikan bahaya bagi kesehatan seseorang, perakitan senjata perang atau pengeksploitasian sumber daya alam yang mengganggu ekosistem dan mengancam hidup manusia, seperti penggundulan hutan yang menyebabkan bencana banjir atau pembuangan limbah yang merusak lingkungan hidup.

Disamping itu, dalam melindungi jiwa juga terdapat perhatian untuk menjaga hak hidup dan menjaga jiwa supaya dijauhkan dari perbuatan penindasan atau kekerasan seperti penganiayaan, pemukulan, pemotongan anggota badan, pembunuhan atau perbuatan termasuk yang dapat merusak badan atau berlebihan dalam konsumsi (*israf*). (Hadi Peristiwo, 2010)

Chapra menjelaskan dalam memelihara dan mengembangkan jiwa manusia, bahwasannya kondisi ini harus dilaksanakan dengan mencukupi kebutuhan utamanya. Kebutuhan yang diperlukan bukan hanya untuk memberikan jaminan

kelangsungan hidup dan kesejahteraan jiwa, tetapi juga untuk memastikan dapat bekerja secara efektif. Sesuai perannya sebagai khalifah. (Yafiz, 2019)

Di antara yang paling penting untuk kebutuhan di atas ialah pemenuhan harkat (*dignity*), rasa hormat (*respect*), ukhuwah/persaudaraan (*human brotherhood*) dan kesetaraan sosial (*social equity*). Inilah kodrat masing-masing manusia yang memiliki tendensi alamiyah agar dihormati serta perlakuan yang sama tanpa pembedaan karena jenis kelamin, warna kulit, suku dan lain-lain yang berbeda sesuai yang termaktub dalam surat Ar-Rum (30) ayat 30 :

فَاقِمِ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

Artinya : “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (Q.S. Ar Rum/30:30, n.d.)

Hal lain yang juga merupakan substansi dari pemeliharaan dan pengembangan jiwa manusia, menurut Chapra adalah perlunya keadilan (*justice*) dan sebaliknya untuk menghindari ketidakadilan (*injustice*). (M. Umer Chapra, 2008) Selain kebutuhan sebagaimana yang disebutkan di atas, kebutuhan lain yang pula memiliki kaitan erat ialah penjaminan terhadap hidupnya, hak milik serta rasa hormat (*Security of Life, Property and Honour*).

Hal tersebut memiliki makna bahwasannya kegiatan ekonomi diharuskan mampu memberikan perlindungan terhadap kehidupan seseorang dan menjauhi berbagai aktifitas ekonomi yang dapat memberikan kerugian bagi kehidupan seseorang, seperti penganiayaan, kejahatan, penghilangan nyawa, pembuatan makanan dan pengedaran obat-obatan yang merusak kesehatan manusia, eksploitasi SDA yang menimbulkan kerusakan ekologi dan merugikan manusia, dan lain-lain. (Yafiz, 2019)

Kebutuhan akan kebebasan (*freedom*) dan pendidikan (*education*), dapat meningkatkan kepribadian dengan menciptakan berbagai kreativitas dan inovasi hidup. Sementara itu melalui pendidikan manusia, manusia akan dapat memperoleh kejelasan terkait berbagai nilai moral dalam Islam dan perspektif dunia untuk mengemban tugas kekhilafahan sebaik-baiknya, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu, sejumlah kebutuhan lain yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan jiwa manusia (*nafs*), tersedianya pemerintahan yang baik untuk penciptaan sosial dan politik (*good governance*), terpenuhinya kebutuhan hidupnya (*need fulfillment*), tersedianya kesempatan bekerja (*self employment opportunity*), pemerataan pendapatan serta kekayaan (*equitable distribution of income and wealth*), pernikahan dan keluarga (*mental peace and happiness*), rasa damai dan bahagia, serta beberapa kebutuhan lainnya.(Yafiz, 2019)

Perlindungan jiwa (*Hifdzu An-Nafs*) diukur menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir, yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Tingginya angka harapan hidup membuktikan semakin baiknya penjaan terhadap jiwa.

Disamping itu, untuk mengukur dimensi hifdzu an-nafs di bentuk index an-nafs dengan menggunakan indikator mengukur dimensi hifdzu an-nafs diantaranya adalah : angka harapan hidup, *drug prevelance* dan *smoking prevelance*.(Anto, 2011)

3. Hifdzu Al-'Aql (Perlindungan Akal)

Penjaan terhadap akal memberi konsekuensi bahwa kegiatan dan aktifitas tersebut dilaksanakan berlandaskan rasionalitas dan menggunakan pengetahuan untuk modal. Pada ilmu ekonomi konvensional, rasionalitas di ukur sesuai dengan nilai utilitarianisme, yakni bahwa aktifitas ekonomi diharuskan

memberikan manfaat yang maksimal bagi orang banyak. Rasionalitas Ekonomi Syari'ah dilandaskan dalam prinsip keadilan yang memiliki unsur persamaannya, pemerataan dan keseimbangan manfaat dari prinsip-prinsip ekonomi. Selain itu, berdasarkan penilaian akal yang merupakan karunia utama Tuhan pada makhluk-Nya, sehingga aktifitas perekonomian harus berkembang dan menghormati akal dan sebagai modalnya. (Rahardo, 2013)

Akal merupakan sumber kebijaksanaan (ilmu), cahaya petunjuk, cahaya hati serta perantara bagi manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dunia juga akhirat. Melindungi dan menjaga akal dapat dilakukan melalui melindungi akal melalui cobaan dan musibah yang dapat dilakukan dan merusak akal tersebut ataupun membuat orang tersebut menjadi sumber kejahatan atau menjadi alat dan perantara kerusakan di dalamnya. Pencegahannya, dari beberapa hak syara' bagi akal ialah menetapkan hukuman atas pelanggaran sebab atau variabel protektif. Oleh karena itu, hukum Islam menetapkan hukuman bagi penikmat alkohol dan pengonsumsi berbagai macam obat-obatan terlarang, apapun nama atau jenisnya dan apapun cirinya. Nurhayati, "Fikih Minoritas : Suatu Kajian Teoritis."

Hal tersebut terdapat pada QS. al-Baqarah (2) ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمِّنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۗ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

Artinya : "Mereka menanyakan untukmu mengenai khamr dan judi. Katakan kepada keduanya itu mengandung dosa besar dan berbagai manfaat untuk manusia. Namun dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya" (Q.S. Al Baqarah/2:219, n.d.)

Islam mengutamakan manusia di atas akalnya, menempatkan akal dalam agamanya, supaya ia memahami bahwa akal adalah persembahan yang sangat mulia.

Menurut Chapra, guna pemeliharaan dan pengembangan akal, perlu didukung ketersediaan pendidikan yang berkualitas melalui biaya yang mudah dijangkau, fasilitas perpustakaan penelitian (*Library and Research Facilities*), hak berpikir dan berekspresi (*freedom of thought and expression*), apresiasi atas prestasi kerja, dan keuangan (*finance*). (M. Umer Chapra, 2008)

Perlindungan akal (*Hifdzu Al-'Aql*) diukur menggunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. (BPS, n.d.-a) AHLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

4. *Hifdzu An-Nasl* (Perlindungan Keluarga/Keturunan)

Menjaga keturunan dalam Islam juga merupakan masalah urgensi yang diutamakan. Untuk menjaga kelangsungan hidup, Islam mewajibkan manusia untuk memelihara keturunan dan keluarganya (*nasl*). Eksistensi manusia dapat dipertahankan dan berlanjut hanya jika keluarga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai. (Fauzia, 2018)

Hal ini dibahas pada Quran Surat An-Nisa (4) ayat 1, berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.,” (Q.S. An Nisa/4:1, n.d.)*

Dampak dari pilar tersebut ialah: pertama, penjagaan kesehatan manusia, khususnya anak dan ibu; kedua, aktifitas pembangunan yang kontinu dengan menciptakan sumber daya ekonomi bagi masa depan.

Sebagaimana didalam al-Qur'an disebutkan bahwasannya manusia tidak boleh mewariskan keadaan kehidupan yang lebih buruk untuk generasi selanjutnya. Atau dalam kalimat positif, manusia mewujudkan atau merintis kehidupan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Sehingga, Ekonomi Islam menciptakan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Menurut Chapra, guna terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan unsur keturunan (*nasl*) dibutuhkan beberapa faktor pendukung, berbagai faktor itu antara lain keluarga yang memiliki integritas (*Marriage and Family Integrity*) melalui menjaga kesehatan ibu serta pemenuhan atas kecukupan gizi untuk anaknya, memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktifitas yang kontinu menciptakan serta menyediakan sumber daya ekonomi bagi generasi saat ini dan generasi mendatang, lingkungan sehat dan juga bersih (*healthy and clean environment*) melalui teori pembangunan yang berwawasan lingkungan, serta pembangunan berkelanjutan, kebebasan dari konflik dan keamanan.(Yafiz, 2019)

Perlindungan Keluarga/Keturunan (Hifz al-Nasl) diukur menggunakan laju pertumbuhan penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. (BPS, n.d.-a) Laju pertumbuhan penduduk merupakan presentase penambahan penduduk pada tahun tertentu. Penjagaan terhadap keturunan ditunjukkan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk. Penduduk dalam hal ini adalah manusia, merupakan sumber daya penting bagi alam semesta, sehingga kuantitasnya harus dijaga.

5. *Hifdzu Al-Māl* (Perlindungan Harta)

Harta atau kekayaan ialah satu dari berbagai kebutuhan pokok dalam kehidupan, karena manusia tidak dapat dipisahkan dari harta atau kekayaan. Hal ini dijelaskan di dalam QS. Al-Kahfi (18) ayat 46 berikut :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمَلًا

Artinya : *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan” (Q.S. Al Kahfi/18:46, n.d.)*

Dalam memperoleh dan memiliki harta dengan syarat kekayaan yang dikumpulkan melewati jalan yang halal; dimanfaatkan untuk hal yang halal; serta melalui harta tersebut haruslah dibelanjakan hak Allah SWT juga masyarakat. (Toriquddin, 2014) Konsekuensinya adalah :

1. Bahwa manusia memiliki hak atas sumber-sumber kebutuhan hidup dengan tetap memperhatikan kegunaan sosial sebab itulah harus berbagi hak dengan sesama atau masyarakat secara keseluruhan.
2. Kegiatan atau aktifitas ekonomi haruslah mampu meningkatkan opsi (*freedom of choice*) pada konsumsi yang bermakna perluasan bebas dalam opsi konsumsi. Ketiga, Sumber daya alam yang dipunyai masyarakat

haruslah digunakan bagi kemakmuran rakyat secara maksimal. (Rahardo, 2013)

Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan perekonomian, menghasilkan barang atau produk dan jasa pada aktifitas produksi dan mengkonsumsi hasil produksi serta mengedarkannya sesuai dengan tuntunan dan aturan agama.

Perlindungan Harta (*Hifdzu Al-Mâl*) diukur menggunakan presentase penduduk miskin. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. (BPS, n.d.-a) Dengan demikian, masyarakat yang mampu mewujudkan penjagaan terhadap harta adalah yang mampu menurunkan presentase penduduk miskinnya.

Penggunaan proxi untuk Perlindungan terhadap Harta (*Hifdzu Al-Mâl*) adalah tingkat kemiskinan yang notabene datanya bersumber dari BPS yang mendefinisikan kemiskinan sebagai bentuk upaya dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, pakaian dan rumah. Kebutuhan tersebut yang sering disebut sebagai kebutuhan dasar manusia (*Basic Need*). Kebutuhan dasar ini harus terpenuhi sebagai bentuk dari kebutuhan yang paling esensial dalam kehidupan.

Kebutuhan dasar (*Basic Need*) manusia berupa kebutuhan primer, seperti makanan, pakaian dan perumahan yang menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan dan aktifitas/ kegiatan perekonomian dalam masyarakat. Kebutuhan dasar inilah yang menjadi tujuan paling esensial dari pembangunan, yaitu upaya-upaya yang mampu memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar tersebut.

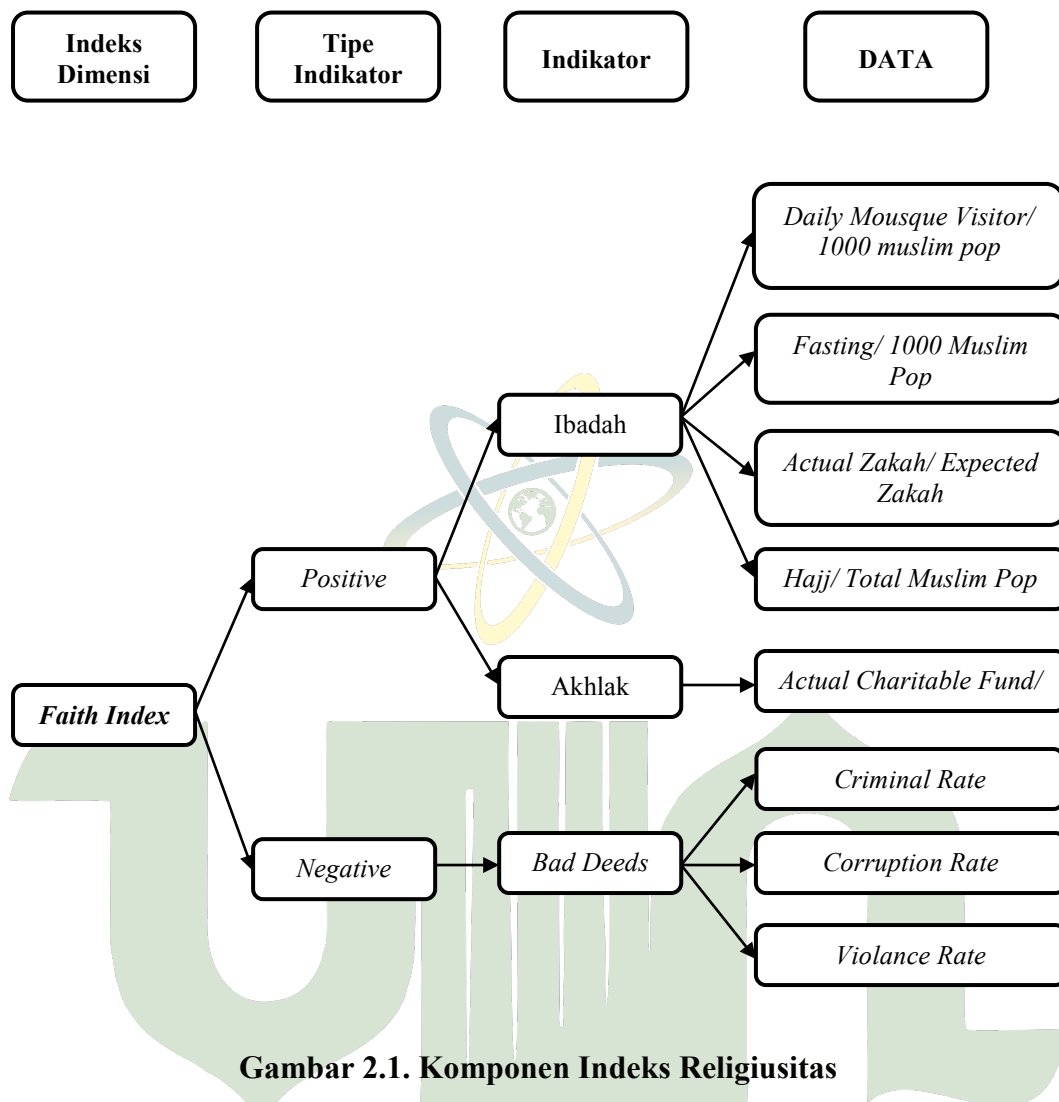
Rama dan Yusuf (2019) mengembangkan penyusunan IHDI dengan dilatarbelakangi bahwa teori HDI yang ada bernilai tetap dan belum dapat menjelaskan pandangan agama dan etika pembangunan sosial-ekonomi khususnya dinegara-negara Islam. (A.Jajang W.Mahri, 2021)

Tabel 2.2. Dimensi dan Indikator IHDI

Dimensi	Indikator	Data
Agama	Beribadah	Pengumpulan zakat/ GDP
	Perilaku (negatif)	Jumlah kriminalitas/ jumlah populasi
		Indeks korupsi
Kehidupan	Harapan hidup	Tingkat harapan hidup
	Kesempatan kerja	Tingkat pengangguran
	Kebebasan	Indeks demokrasi
	Kebutuhan dasar	Tingkat kemiskinan
Rata-rata pengeluaran		
Pengetahuan	Akses kepada lembaga pendidikan	Jumlah sekolah/ jumlah penduduk
	Hasil pendidikan	Tingkat kemampuan membaca dan menulis
Keluarga	Positif	Tingkat Pernikahan
	Negatif	Tingkat Perceraian
		Tingkat Kematian Bayi
Kekayaan	Kepemilikan Kekayaan	GDP Perkapita
	Pertumbuhan Kekayaan	Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi
	Distribusi Kekayaan	Rasio Gini

Sumber : Penelitian Rama & Yusuf (2019)

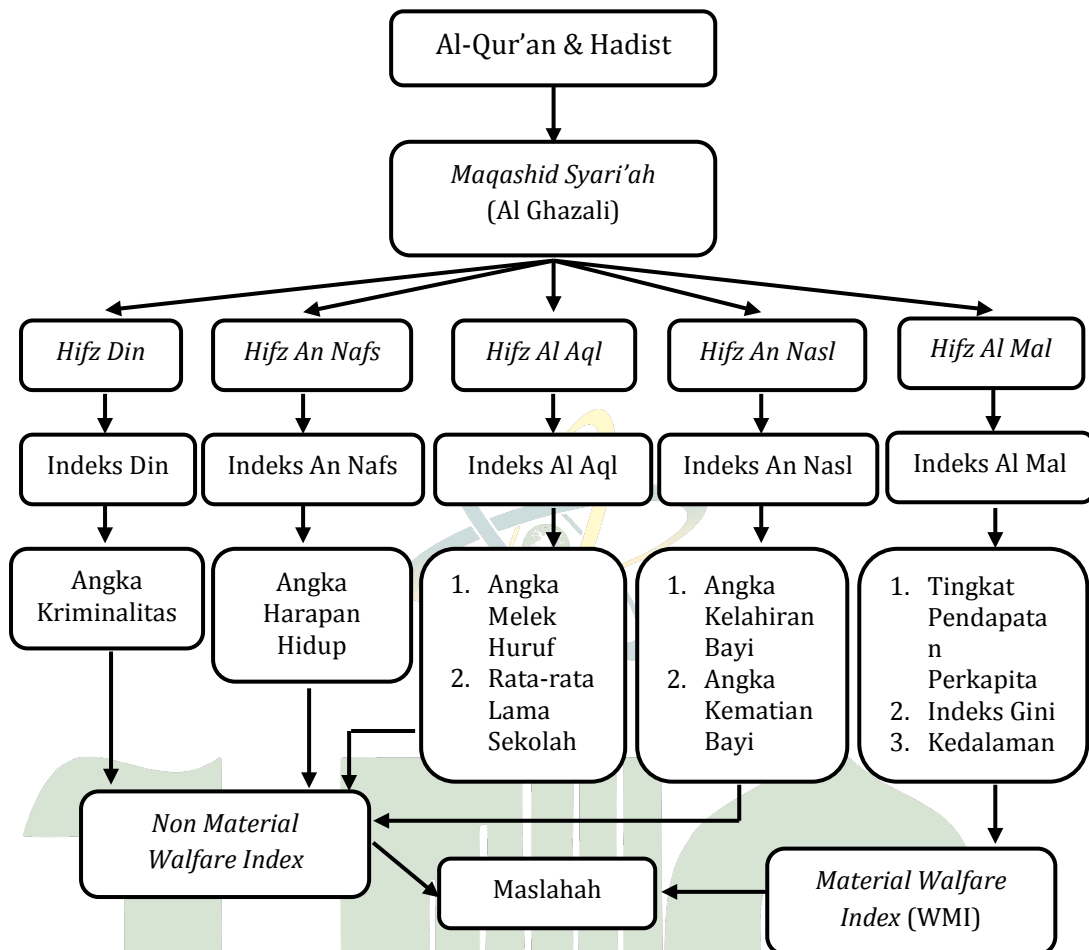
Peneliti lain yang menggunakan IHDI sebagai proxi dalam mengukur pembangunan manusia, adalah Hendri Anto MB (2010) menyebutkan bahwa dalam pengukuran Index Pembangunan Manusia Islami (IHDI) umumnya menambahkan dimensi pencapaian index tersebut dari pendekatan Maqhasid Syariah, ditambah indeks religiusitas, yaitu *hifz al-din*. (Anto, 2011)



Gambar 2.1. Komponen Indeks Religiusitas

Pengukuran pembangunan manusia dari perspektif Islam yang lebih holistik meliputi segala dimensi kebutuhan manusia berdasarkan maqashid syariah yang lebih komprehensif tentang pola pembangunan yang hendak dilaksanakan, terutama negara populasi Islam terbesar. *Islamic Human Development Index* (IHDI) mengategorikan kebutuhannya terhadap kesejahteraan manusia menjadi dua, yakni Kesejahteraan Material (*Material Welfare*) dan Kesejahteraan Non Material (*Non Material Welfare*) pada bagan di bawah berikut. (A.Jajang W.Mahri, 2021)

Untuk lebih jelasnya konsep dan indikator *Islamic Human Development* (IHDI) yang diuraikan sebelumnya, dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2.2. Kerangka Indikator *Islamic Human Development Index* (IHDI)

Rama dan Yusuf (2019) mengembangkan penyusunan IHDI dengan dilatarbelakangi bahwa teori HDI yang ada bernilai tetap dan belum dapat menjelaskan pandangan agama dan etika pembangunan sosial-ekonomi khususnya dinegara-negara Islam. (A.Jajang W.Mahri, 2021). Peneliti lain yang menggunakan IHDI sebagai proxy dalam mengukur pembangunan manusia, adalah Hendri Anto MB (2010) menyebutkan bahwa dalam pengukuran Index Pembangunan Manusia Islami (IHDI) umumnya menambahkan dimensi pencapaian index tersebut dari pendekatan Maqhasid Syariah, ditambah indeks religiusitas, yaitu *hifz al-din*. (Anto, 2011).

Dari kelima indeks tersebut maka disusunlah rumus I-HDI yang didasarkan pada dimensi kesejahteraan material (MWI) dan kesejahteraan non material (NMW) yang dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut : (Anto, 2011)

$$\mathbf{I-HDI : 5/6 MI + 1/6 AI}$$

$$\mathbf{MI = 2/6 FI + 1/6 (LI+SI+FSI+PI)}$$

Keterangan : MI= *Main Index*, SI = *Science Index*, FI = *Faith Index*, FSI = *Family Social Index*, LI = *Life Index*, PI = *Property Index*

D. Pembiayaan Perbankan

Sektor keuangan memegang peranan yang sangat signifikan dalam memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sektor keuangan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor riil via akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Lebih tepatnya, sektor keuangan mampu memobilisasi tabungan, penyediaan para peminjam berbagai instrumen keuangan dengan kualitas tinggi dan resiko rendah. Hal ini akan menambah investasi dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi (Inggrid, 2006).

Pembiayaan perbankan adalah salah satu kegiatan perbankan dalam menunjang kegiatan ekonomi suatu negara. Apabila pembiayaan yang diberikan dialokasikan ke dalam bentuk usaha yang produktif maka hal tersebut dapat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Fahrani (2013) menyatakan bahwa terdapat korelasi antara pembiayaan perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Pernyataan ini juga diperkuat dengan Abduh (2012), dimana terdapat hubungan kausalitas dua arah antara pembiayaan perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi. (Syahputra & Ningsih, 2020)

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat penerima, diantaranya : Iman Taufik, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Berdasarkan Jenis Akad dan

Jenis Penggunaan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011-2015,” vol. 4, 2017, 9–15.

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

2) Meningkatkan daya guna barang

a. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng.

b. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet, giro, wesel, promes, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal dan sebagainya.

4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha

tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

5) Stabilitas ekonomi dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain :

a) Pengendalian inflasi

b) Peningkatan ekspor

c) Rehabilitasi prasarana

d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan earnings (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan devisa negara. Disamping itu, dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang berguna.

7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Amerika Serikat yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa negara maju lainnya.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut : (Taufik, 2017)

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut :

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :
 - (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produktif, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas mutu hasil produktif, dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam, istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank Islam, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard', surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrasi, serta sertifikat wadiah

Pada dasarnya, pendanaan syariah merupakan suatu kegiatan penyediaan biaya yang mempraktikkan sistem sesuai syariat Islam. Pihak lembaga pembiayaan dan nasabah yang terlibat dalam aktivitas ini telah bersepakat terkait imbalan maupun periode pengembalian dana. Berbeda dengan pembiayaan konvensional, jenis pendanaan ini harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).

Berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 25, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah
- b. Transaksi sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan Istishna
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh
- e. Transaksi multi jasa dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Pembiayaan ini merupakan salah satu produk taawun (tolong-menolong) dari pihak pemilik dana (sahibul mal) kepada pihak yang membutuhkan tanpa diikuti dengan hal bathil. Sebagaimana diterangkan dalam al-Quran surat an-Nisa' (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu"*

Hadits Riwayat Ibn Majah dari Suhaib menerangkan bahwa ada tiga hal yang mengandung berkah, yakni jual beli secara tidak tunai, mudharabah, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan sendiri. Hadits tersebut secara implisit menyatakan bahwa pembiayaan dianjurkan, baik dalam bentuk jual beli maupun mitra (mudharabah)

Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan

jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Menurut kegunaannya, pembiayaan perbankan syariah dapat dibedakan menjadi dua hal berikut :

- 1) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.
- 2) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam hal ini untuk peningkatan usaha melalui penyediaan modal kerja maupun investasi.
 - a) Pembiayaan modal kerja, adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan : a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif (peningkatan jumlah hasil produksi), maupun secara kualitatif (peningkatan mutu hasil produksi); dan b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
 - b) Pembiayaan investasi, adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan : (Taufik, 2017)

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat di akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.

- 2) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya
- 3) Membuka lapangan kerja baru artinya : dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 4) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk :

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya : usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul, risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan.

Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

- 4) Penyaluran kelebihan dana, dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, mekanisme pembiayaan dapat

menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak surplus kepada pihak yang kekurangan (defisit) dana.

Produk-produk pembiayaan untuk perbankan syariah yang ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil (mudharabah dan musharakah) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan, menggunakan pola jual beli (murabahah, salam, dan istishna'), dan menggunakan pola sewa (ijarah dan ijarah muntahiya bi at- tamlik).

E. Ketenagakerjaan dan Upah Tenaga Kerja

1. Tenaga Kerja

Faktor produksi sering diklasifikasikan menjadi empat, yaitu tanah, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan. Pengklasifikasian terhadap keempat faktor produksi tersebut didasarkan atas perbedaan elastisitas penawaran parsial, karakteristik yang terkandung pada setiap faktor produksi, dan imbalan yang diterima masing-masing pemilik faktor produksi. Secara historis, perbedaan ini bersesuaian dengan berkembangnya *bargaining position* antara tiga kelompok masyarakat, kapitalis, tuan-tuan tanah dan buruh (tenaga kerja). Kekuatan pasarlah yang kemudian menentukan berapa besar imbalan yang akan diterima masing-masing. Tenaga kerja akan mendapatkan upah, tuan tanah mendapatkan sewa tanah, pemilik modal mendapatkan tingkat bunga (Makmun dan Yasin, 2003). (Barimbing & Karmini, 2015)

Pandangan ekonomi kapitalis terhadap tenaga kerja tidak terlepas dari konsep faktor produksi atau input. Perkembangan iklim usaha menuntut adanya penyesuaian perlakuan terhadap tenaga kerja. Pada awalnya ada kecenderungan tenaga kerja dianggap sebagai suatu faktor produksi lainnya yang memberikan kontribusi relatif tetap terhadap produksi. Pandangan ini yang menghasilkan sistem pengupahan tetap terhadap tenaga kerja sebagaimana input tanah mendapatkan sewa tetap dan modal mendapatkan bunga.

Adanya ketidakstabilan sifat dan karakter tenaga kerja, mendorong perusahaan untuk memberikan perlakuan lain terhadap tenaga kerja. Jika tanah dan modal dapat diperjualbelikan di pasar sedangkan tenaga kerja tidak demikian. Namun demikian, hal ini tidak cukup menjadikan alasan bagi aliran ekonomi utama (*mainstream economy*) untuk melakukan pembedaan analisis terhadap faktor produksi lain. Tenaga kerja dipandang sebagai suatu faktor produksi yang mampu untuk meningkatkan daya guna faktor produksi lainnya (mengolah tanah, memanfaatkan modal, dsb) sehingga perusahaan memandang tenaga kerja sebagai suatu investasi dan banyak perusahaan yang memberikan pendidikan kepada karyawannya sebagai wujud kapitalisasi tenaga kerja. (Abidin, 2012)

Menurut BPS, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah : “Penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencapai pekerjaan dan melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Batas umur tenaga kerja minimum adalah 15 tahun tanpa batas umur maksimum.” (Abidin, 2012) Hal ini menjelaskan bahwa tenaga kerja itu meliputi penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, baik yang sudah bekerja maupun yang masih mencari pekerjaan serta yang melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti sekolah, mengurus rumah tangga, dan golongan lain yang menerima pendapatan.

Menurut Konsep *Labor Force Framework*, tenaga kerja atau *manpower* terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumahtangga (maksudnya ibu-ibu yang bukan wanita karir), serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya (pensiunan, penderita cacat yang dependen). Tenaga kerja dapat dirumuskan sebagai berikut : (BPS, n.d.-a)

Tenaga Kerja = Angkatan Kerja + Bukan Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah angkatan kerja yang bekerja, sementara tidak bekerja dan mencari kerja dengan jumlah penduduk usia kerja dengan rumus :

$$TPAK = \frac{\sum \text{Angkatan Kerja (Bekerja + Sementara Tidak Bekerja + Mencari kerja)}}{\sum \text{Tenaga Kerja}}$$

Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan jumlah angkatan kerja yang tidak/ belum bekerja dengan jumlah penduduk usia kerja dengan rumus :

$$TPT = \frac{\sum \text{Angkatan Kerja (Yang Tidak Bekerja + Yang belum bekerja)}}{\sum \text{Tenaga Kerja}}$$

Dari pemaparan diatas bisa dipahami bahwasannya tenaga kerja mencakup penduduk dengan usia 15 tahun keatas, yang telah bekerja atau yang dikategorikan sebagai pengangguran (*open unemployment*), yaitu : “golongan yang termasuk kedalam angkatan kerja (15 tahun keatas) yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang menyiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan sebab merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan dan yang telah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dan dalam saat yang sama mereka tidak bekerja” (*jobless*). (BPS, 2020a)

Artoyo (1999:65), pengertian tenaga kerja secara umum adalah pengertian tentang potensi yang terkandung dalam diri manusia yang dikaitkan dengan pemanfaatan berbagai kegiatan usaha yang ada, keterlibatan unsur jasa atau tenaga kerja dalam hubungan kerja sehingga ada penyebutan tenaga kerja bagi yang memberikan jasa tersebut, pengusaha atau yang mempekerjakan. (Satria & Mubarak, 1999)

Masalah yang sering timbul dalam ketenagakerjaan adalah ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja pada tingkat upah tertentu (Kusumosuwidho dalam Subri, 2003: 54).

Ketidakseimbangan ini dapat berupa kelebihan penawaran tenaga kerja, yaitu jika penawaran lebih besar dari permintaan tenaga kerja, atau terjadi kelebihan permintaan tenaga kerja, yaitu jika permintaan tenaga kerja lebih besar dari penawaran tenaga kerja.

Jika dikaitkan dengan aspek kinerja ekonomi adalah sejauh mana ekonomi menggunakan sumber daya dengan baik. Karena pekerja ekonomi adalah sumber daya utama mereka, membuat pekerja tetap bekerja adalah sorotan para pembuat kebijakan ekonomi. Istilah kesempatan kerja mengandung pengertian tentang kesempatan yang tersedia sebagai akibat dari kegiatan ekonomi (memproduksi barang dan jasa) (Mankiw, 2003).

Kesempatan kerja dalam ilmu ekonomi berarti kesempatan atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang mau dan mampu bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan bakatnya. Kesempatan kerja (permintaan tenaga kerja) adalah kondisi yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan (tenaga kerja yang harus diisi oleh pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan akan tenaga kerja.

Menurut Todaro (2000), pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya.

Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi

modal dan tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah terbatas. Dalam keadaan demikian penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja.

Menurut Nicholson W. (1991) bahwa suatu fungsi produksi suatu barang atau jasa tertentu (q) adalah $q = f(K, L)$ dimana k merupakan modal dan L adalah tenaga kerja yang memperlihatkan jumlah maksimal suatu barang/jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara K dan L maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi. Tambahan keluaran yang diproduksi inilah yang disebut dengan produk fisik marjinal (*Marginal Physical Product*).

Selanjutnya dikatakan bahwa apabila jumlah tenaga kerja ditambah terus menerus sedang faktor produksi lain dipertahankan konstan, maka pada awalnya akan menunjukkan peningkatan produktivitas namun pada suatu tingkat tertentu akan memperlihatkan penurunan produktivitasnya serta setelah mencapai tingkat keluaran maksimal setiap penambahan tenaga kerja akan mengurangi pengeluaran.

Payaman J. Simanjuntak (1985) menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Menurut BPS penduduk berumur 10 tahun ke atas terbagi sebagai Angkatan Kerja

(AK) dan bukan AK. Angkatan Kerja dikatakan bekerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara kontinu selama seminggu yang lalu. Sedangkan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan disebut menganggur (Budi Santosa, 2001).

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi di suatu daerah.

Konsep dan pandangan dalam Islam terkait pemanfaatan tenaga kerja manusia dalam rangka mengejawantahkan dan mengaktualisasikan fungsi kekhalifaan dan sekaligus fungsinya sebagai pembangunan, sangat dihargai oleh ajaran (syari'at Islam). Sehubungan dengan hal tersebut, manusia sebagai pekerja, mutlak memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan melaksanakan aktivitasnya. Dalam hal ini, Dr. Ahmad Muhammad Al-Assad memberikan beberapa catatan alternatif, agar manusia sebagai makhluk pekerja (pembangun dan khalifah), dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mustinya.

Syari'at Islam mempunyai dasar-dasar yang kuat untuk dikembangkan dalam upaya untuk membentuk sebuah rumusan tentang ketenagakerjaan. Dalam Syari'at Islam terdapat konsepsi ketenagakerjaan yang dapat dikembangkan dan dibangun dalam rangka untuk menambah dan memberikan nilai tambah ke dalam konsepsi ketenagakerjaan yang berlaku secara konvensional selama ini.

Konsepsi ketenagakerjaan tersebut akan semakin mempunyai ciri khas, bila sistemnya didasari serta dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar utama, yaitu prinsip tauhid, prinsip kemanusiaan dan prinsip akhlak (etika). Disamping itu pula, untuk menciptakan seorang tenaga kerja yang Islami, maka diperlukan adanya sikap dan tindakan serta karakter yang Islami pula.

Islam telah memperingatkan umatnya agar tidak menganggur, hal ini tertera dalam Al-Qur'an surat An-Naba ayat 11 yang berbunyi:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Artinya : “Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan”.
(Departemen Agama RI, 2012: 582)

Menurut Qardhawi (2005:6-18) pengangguran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu : (Nafilah, 2016)

- a) Pengangguran jabariyah (terpaksa) adalah pengangguran dimana seseorang tidak mempunyai hak sedikit pun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini umumnya terjadi karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikit pun, yang sebenarnya bisa dipelajari sejak kecil sebagai modal untuk masa depannya atau seseorang telah mempunyai suatu keterampilan tetapi keterampilan ini tidak berguna sedikit pun karena adanya perubahan lingkungan dan perkembangan zaman.
- b) Pengangguran khiyariyah adalah seseorang yang memilih untuk menganggur padahal pada dasarnya mampu untuk bekerja.

Adanya pembagian kedua kelompok ini mempunyai kaitan erat dengan solusi yang ditawarkan Islam untuk mengatasi suatu pengangguran. Kelompok pengangguran jabariyah perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar mereka dapat bekerja. Sebaliknya, Islam tidak mengalokasikan dana dan bantuan untuk pengangguran khiyariyah karena pada prinsipnya mereka memang tidak memerlukan bantuan karena pada dasarnya mereka mampu untuk bekerja hanya saja mereka malas untuk memanfaatkan potensinya dan lebih memilih menjadi beban bagi orang lain

2. Upah Tenaga Kerja

Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana, upah didefinisikan sebagai hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pasal 1 ayat (1), upah didefinisikan sebagai hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah diberikan sebagai bentuk balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Menurut Muchdarsyah Sinungan, upah kerja adalah pencerminan pendapatan nasional dalam bentuk upah uang yang diterima oleh buruh sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dicurahkan untuk pembuatan suatu produk. Selain pendapat di atas, ada beberapa pengertian lain tentang upah, menurut Sadono Sukirno, upah adalah pembayaran atas jasa-jasa fisik yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Sementara menurut Malayu SP. Hasibuan, upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada para pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya.

Menurut PP No.8/1981, Upah Minimum adalah upah yang ditetapkan pada tingkat minimum regional, regional, dan subsektoral. Dalam hal ini, upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan. Penetapan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah didasarkan pada beberapa hal yaitu kebutuhan hidup minimum (KHM), Indeks Harga Konsumen (IHK) atau tingkat inflasi, perluasan kesempatan kerja, upah yang berlaku secara regional dan tingkat pembangunan

ekonomi daerah. Berbagai faktor yang ada dalam komponen KHM dinilai dengan harga yang berlaku untuk menghasilkan suatu tingkat upah. Karena harga sangat bervariasi antar daerah dan terdapat situasi lokal yang mungkin tidak berlaku secara nasional, maka besaran upah minimum disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah atau lebih sering disebut dengan upah minimum provinsi/UMP (Tjiptoherijanto, 2003: 167).

Dari beberapa definisi tentang upah di atas maka dapat disimpulkan bahwa, upah merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja dari pengusaha atas jasa yang diberikan untuk perusahaan berdasarkan lamanya jam kerja dan jumlah produk yang dihasilkan, serta adanya kesepakatan antara pekerja dan pengusaha dalam menentukan besaran upah.

Penetapan upah minimum di Indonesia dilakukan setiap tahun yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak yaitu kebutuhan pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan satu bulan. Penetapan upah minimum Propinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur. Penetapan upah minimum dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta PDRB_t)\}$$

Dimana :

UM_n = Upah minimum yang akan ditetapkan

UM_t = Upah minimum tahun berjalan

Inflasi = Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan

ΔPDRB_t = Pertumbuhan Produk Regional Bruto yang dihitng dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

Beberapa teori upah menurut para ahli, diantaranya :

a. Teori Upah Efisiensi

Menurut teori efisiensi, perusahaan akan beroperasi lebih efisien jika upah berada diatas ekuilibrium, jadi akan lebih menguntungkan jika perusahaan

tetap mempertahankan upah tetap tinggi meskipun penawaran tenaga kerja berlebih. Menurut teori upah efisiensi membayar upah yang tinggi mungkin akan menguntungkan perusahaan karena bisa menaikkan efisiensi para pekerja.

Ada beberapa jenis teori upah efisiensi yang dikembangkan oleh Gregory Mankiw untuk menjelaskan mengapa perusahaan mau membayar upah yang lebih tinggi kepada pekerja diantaranya : (Mankiw, 2007)

1) Kesehatan Pekerja

Teori upah efisiensi yang berkaitan dengan kesehatan pekerja. Para pekerja yang memperoleh upah yang lebih tinggi dapat mengonsumsi lebih banyak nutrisi, dan dengan demikian akan lebih sehat dan lebih produktif. Sebuah perusahaan mungkin menguntungkan untuk membayar upah tinggi dan memiliki tenaga kerja yang sehat dan produktif, daripada membayar upah yang rendah tetapi memiliki pekerjaan yang tidak sehat dan kurang produktif, jenis teori upah ini lebih relevan untuk di negara yang sedang berkembang.

2) Perputaran Pekerja

Jenis teori upah efisiensi ini menjelaskan hubungan antara upah dengan perputaran kerja. Pekerja berhenti bekerja karena beberapa alasan pindah ketempat kerja lain, pindah ke kota lain, meninggalkan angkatan kerja dan lain-lain. Frekuensi perputaran ini tergantung pada insentif-insentif yang mereka hadapi yaitu manfaat terus bekerja versus manfaat berhenti bekerja. Semakin tinggi upah dibayar kepada tenaga kerja semakin rendah pekerja akan berhenti dari pekerjaannya, jadi sebuah perusahaan dapat mengurangi perputaran pekerja dengan membayar upah yang lebih tinggi. Alasan kekhawatiran perputaran pekerja tersebut adalah akan lebih mahal bagi perusahaan untuk merekrut dan melatih pekerja-pekerja baru.

3) Kerja Keras Pekerja

Jenis teori upah efisiensi ini menjelaskan bagaimana keterkaitan antara upah dengan kerja keras pekerja. Dalam banyak pekerjaan, pekerja bekerja secara bebas, akibatnya perusahaan harus memantau kinerja pekerja tersebut, dan bagi para pekerja yang terbukti melalaikan tanggung jawab mereka akan dipecat. Tetapi tidak semua yang lalai yang bisa tertangkap secara langsung karena pemantauan pekerja mahal dan tidak efisien.

4) Kualitas Pekerja

Jenis teori upah efisiensi ini menyatakan bahwa kualitas rata-rata dari armada kerja perusahaan bergantung pada upah yang ia bayarkan pada karyawannya. Jika perusahaan mengurangi upahnya, para pekerja terbaik bisa mengambil pekerjaan dimana saja, meninggalkan perusahaan dengan para pekerja tidak terdidik yang memiliki lebih sedikit alternatif. Para ekonom menyadari penyaringan yang tidak menyenangkan ini sebagai contoh dari seleksi kebalikan, kecenderungan orang dengan lebih banyak informasi untuk menyeleksi diri sendiri dalam cara yang dilakukan orang-orang yang tidak beruntung dengan lebih sedikit informasi. Dengan membayar upah di atas keseimbangan, perusahaan bisa menurunkan seleksi kebalikan, meningkatkan kualitas rata-rata armada kerjanya, sehingga mampu meningkatkan produktivitas.

b. Teori Malthus

Tokoh mazhab klasik ini meninjau upah dalam kaitannya dengan perubahan penduduk. Jumlah penduduk merupakan faktor strategis yang di pakai untuk menjelaskan berbagai hal. Oleh karena itu, tingkat upah yang terjadi adalah karena hasil bekerjanya permintaan dan penawaran sudut pandang kaum klasik bertitik tolak dari sisi penawaran (*supply side economies*) yang akhir-akhir ini menjadi populer lagi.

Tingkat upah sebagai harga penggunaan tenaga kerja, juga banyak ditentukan oleh penawaran tenaga kerja, seperti diutarakan di muka bahwa sumber utama penawaran tenaga kerja adalah penduduk, usia kerja yang sudah barang tentu bersumber dari penduduk. Bila penduduk bertambah, penawaran tenaga kerja juga bertambah, maka hal ini menekan tingkat upah. Sebaliknya pun secara simetris tingkat upah akan naik bila penduduk berkurang sehingga penawaran tenaga kerja pun berkurang.

Oleh karena itu, dilihat dari sisi lain usaha menaikkan tingkat upah tidak akan ada faedahnya dalam jangka panjang sebab bila upah lebih tinggi dari semula.

c. Teori John Stuart Mills

Tokoh mazhab klasik yang pendapatnya dapat menyimpulkan bahwa tingkat upah juga tidak akan beranjak dari tingkat semula, namun dengan alasan yang berbeda.

Menurutnya, dalam masyarakat tersedia dana (*wage funds*) untuk pembayaran upah. Dunia usaha menyediakan sebagian dari dananya yang diperuntukkan bagi pembayaran upah. Pada saat investasi sudah dilaksanakan, jumlah dana tersebut sudah tertentu. Jadi tingkat upah tidak dapat berubah jauh dari alokasi tersebut. Dari dua tokoh klasik ini dapat disimpulkan ada kesan pesimisme bahwa tingkat upah hanya berkisar pada tingkat yang rendah. Seberapa tingkat rendah tersebut, yaitu tingkat yang dapat mempertahankan kehidupan.

Mempertahankan mempunyai implikasi mengacu pada apa yang ada atau yang lalu. Bila yang lalu rendah, maka yang akan datang rendah. Masa dimana pendapatan ini berkembang secara kebetulan bertepatan dengan terjadinya revolusi industri yang menyerap tenaga kerja secara masal dengan upah rendah. Disamping karena rendahnya keterampilan mereka, hal ini juga karena sikap kurang begitu menghargainya pemimpin usaha terhadap tenaga kerja.

d. Teori Upah Menurut Pertambahan Produk Marginal

Teori neo klasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut.

Teori produktivitas marginal menyatakan bahwa biaya produksi tambahan yang dibayarkan kepada faktor produksi itu sama dengan hasil penjualan tambahan yang diperoleh dari produksi tambahan yang diciptakan oleh faktor produksi tersebut. Dari konsep di atas kemudian dikenal istilah *Marginal Product of labour* (MPL), yaitu tambahan output yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat penambahan input sejumlah satu unit. Dalam pandangan klasik, MPL inilah yang dianggap sama dengan upah riil yang diterima oleh tenaga kerja ($MPL = W/P$). Teori ini didasarkan pada asas nilai pertambahan hasil marginal faktor produksi, di mana upah merupakan imbalan atas pertambahan nilai produksi yang diterima perusahaan dari karyawan.

Dalam pandangan ilmu ekonomi konvensional upah riil sangat tergantung kepada produktivitas dari tenaga kerja. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori permintaan keatas produksi. Upah yang diterima oleh pekerja terutama tergantung pada produktivitas tenaga kerja.

Data kenaikan upah di berbagai negara maju, menunjukkan bahwa adanya hubungan yang erat antara kenaikan upah riil pekerja untuk meningkatkan produktivitas mereka. Selain menggunakan data, analisis juga dapat menunjukkan grafis hubungan antara produktivitas dengan upah riil.

e. Teori Upah Berdasarkan Daya Beli

Kemajuan industri tidak mungkin wujud kecuali dengan adanya kecukupan permintaan yang menjamin distribusi produk dengan harga yang menghasilkan keuntungan normal bagi perusahaan.

Di sisi lain kaum pekerja dan keluarganya adalah salah satu konsumen terbesar produk- produk tersebut. Oleh karena itu kenaikan tingkat upah akan berpengaruh pada kenaikan tingkat permintaan atas barang dan jasa, dan sebaliknya penurunan tingkat upah akan berpengaruh pada penurunan permintaan atas barang dan jasa karena penurunan daya beli. Penurunan daya beli ini berikutnya akan berpengaruh pada kemampuan penyerapan pasar atas barang yang diproduksi sehingga berakibat turunnya omzet dan keuntungan perusahaan.

Pendukung teori ini menyatakan jika daya beli masyarakat atas barang turun sedang tingkat upah tetap, maka biaya produksi akan naik, karena tenaga kerja adalah unsur utama produksi. Penurunan daya beli akan berpengaruh pada penurunan produksi. Jika tingkat upah tidak diturunkan maka berakibat pada meningkatnya biaya produksi sehingga harga barang akan naik dan berakibat hilangnya daya beli pasar sama sekali.

Konsep Islam terkait tenaga kerja ialah semua usaha serta ikhtiar dari badan maupun pikiran dengan tujuan memperoleh imbalan sesuai. Dan seluruh jenis pekerjaan yang dikerjakan pikiran dan fisiknya. Islam memberikan dorongan kepada umat agar bekerjanya dan menghasilkan dan menetapkannya sebagai suatu keharusan bagi mereka yang memiliki kemampuan, kemudian Allah SWT akan membalas dengan sebanding yang sesuai amalnya, sebagaimana dalam firmannya :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUKSES BERSAMA-SAMA

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.(Q.S. An Nahl/16:97, n.d.)

Al-Qur'an lebih memberi tekanan kepada pekerjaan dan menjabarkan secara terperinci bahwasannya manusia untuk melakukan pekerjaan guna mencari kehidupannya. Berbagai bentuk pekerjaan yang dianjurkan Islam ialah yang dikerjakan dengan kemampuan sendiri dan yang memberikan manfaat, yakni :(Aravik, 2018)

1. Menghidupi tanah mati (tanah yang tak mempunyai pemilik dan tak diambil manfaatnya dari siapapun)
2. Menggali isi bumi
3. Berburu
4. Makelar (*samsarah*)
5. Peseroan antara harta dan tenaga (*mudharabah*)
6. Pengairan lahan tani (*musaqat*)
7. Kontrak tenaga pekerja (*ijarah*)

Harta yang diperoleh bersamaan dari tenaga pekerja dan modalnya diakui dalam Islam, maka dari itu tenaga kerja mempunyai posisi komparatif cukup rentan. Untuk itu Islam menentukan berbagai aturan dalam memberikan perlindungan hak tenaga kerja.

Islam juga memandang bahwa seluruh orang baik pria ataupun wanita sama, dimana kesamaan itu mewajibkan persaudaraan dan kesamaan antara muslim juga menghapus segala jarak antara manusia sebab warna kulitnya, ras, bahasa ataupun kekayaan. Selain itu, Islam memberikan jaminan perlakuan atau kemuliaan dan kehormatan manusiawi kepada tenaga pekerja. Islam mewajibkan pasti dan segera untuk membayarkan upah.

Disamping itu, Rasulullah SAW, telah melarang mempekerjakan pekerja tanpa menetapkan upahnya terlebih dahulu. Rasulullah juga menentukan untuk berperilaku baik kepada pelayannya. Rasulullah memberikan petunjuk bahwa dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan dan

memberikan ketenangan, mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

Upah yang diberikan haruslah sesuai dengan tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat maka upah para pekerja harus dinaikkan sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup. Prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, atau menentukan upah pegawai tidak berlebihan tidak juga terlalu sedikit. Tujuan utamanya adalah agar para pegawai mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka tidak terdorong untuk melakukan tindakan yang dibenarkan untuk sekedar memenuhi nafkah diri dan keluarganya.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja dan pengusaha. Dalam menentukan besaran upah, maka kepentingan pekerja dan pengusaha akan dipertimbangkan secara adil. Untuk menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup, dalam arti upah tersebut tidak terlalu rendah agar dapat mencukupi kebutuhan pokok pekerja, juga tidak terlalu tinggi agar pengusaha tidak kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari proses produksi, maka untuk itu negara perlu menetapkan tingkat upah minimum dengan mempertimbangkan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dengan tingkat upah minimum ini dalam keadaan apapun pekerja tidak terzalimi dan harus sewaktu-waktu dipantau dan ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian terhadap tingkat harga dan biaya hidup nyata sehari-hari.

Teori Afzarul Rahman terhadap penetapan upah minimum adalah upah atau gaji memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Negara sebagai wakil Allah di muka bumi diharapkan dapat melakukan pemerataan rezeki terhadap anggota masyarakatnya. Dan tidak akan pernah memperbolehkan pemberian upah yang berada dibawah tingkat minimum agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

Tingkat upah minimum haruslah adil dan layak karena itu upah disuatu negara harus memahami kebutuhan hidup layak. Sementara untuk penetapan tingkat upah maksimum harus ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya. Islam juga melarang tingkat upah dibawah upah minimum yang tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok pekerja, selain itu islam melarang pemberian upah yang melebihi tingkat tertentu berdasarkan sumbangsih pekerja tersebut dalam proses produksi, hal ini tercantum dalam surat Q.S An-Najm ayat 39, yaitu :



وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya : *“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya”*.

Dan surat Q.S Yaasiin ayat 54, yaitu :



فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan”*.


Jika suatu waktu upah jatuh berada dibawah tingkat upah minimum atau upah berada di atas tingkat upah maksimum, maka negara berkewajiban dan mempunyai hak yang sah untuk campur tangan dalam menentukan tingkat upah. Tujuannya adalah agar tidak terjadi konflik antara pekerja dan pengusaha yang pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai islam. Pertama, memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. Kedua, memberikan kebebasan sepenuhnya kepada para pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendaknya dan sesuai keahliannya, tanpa ada batasan yang bisa menimbulkan kesulitan dalam pemilihan pekerjaan atau dalam memiliki pekerjaan tersebut dari segi geografi. Kebebasan dalam mobilisasi kerja diantara daerah dan pekerjaan yang berada membantu menjaga kestabilan upah seluruh negeri.


F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini digunakan sebagai literature sekaligus penguat serta untuk menganalisis perbedaan diantara penelitian tersebut.


Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu


No.	Peneliti dan Media Publikasi	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Done Ioan ScienceDirect Procedia Economics and Finance 8 (2014) 268 – 274	<i>Employment - cause and effect of the economic growth</i>	Studi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pertumbuhan lapangan kerja melibatkan kinerja ekonomi yang tinggi, yang terutama ditunjukkan oleh tingginya kinerja pekerjaan dan khususnya pengembangan dan diversifikasi sektor jasa. Juga, dalam makalah disajikan implikasi utama dari pengurangan minggu kerja dan fleksibilitas program kerja.
2.	Bahril Datuk JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS Vol 14 No . 1 / Maret 2014	Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi	Hasil studi menemukan bahwa secara internasional sukuk berkembang cukup pesat, sejalan dengan perkembangan institusi keuangan syariah dan tingginya demand atas instrumen keuangan syariah. Hal ini terbukti dengan luasnya basis investor yang tidak hanya berbasis syariah tapi juga dari investor berbasis konvensional. Juga tingginya minat negara-negara dengan penduduk minoritas muslim untuk mengadopsi konsep keuangan syariah. Di Indonesia, perangkat peraturan dan perundangan sudah cukup lengkap untuk mendukung perkembangan sukuk, baik sisi syariah maupun Negara

3.	<p>Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf</p> <p>JURNAL EKONOMI Volume 22, Nomor 2 Juni 2014</p>	<p>Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau</p> 	<p>Dari hasil analisis diketahui tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap IPM. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negative terhadap IPM, masing-masing dengan koefisien regresi sebesar - 0,163 dan - 0,084. Upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM, dengan koefisien regresi masing-masing 0,005 dan 0,953. Variable yang sangat besar pengaruhnya terhadap IPM adalah laju pertumbuhan ekonomi.</p>
4	<p>M. Zahari, MS</p> <p>Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, Jambi, Volume 14 No. 3 Tahun 2014</p>	<p>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Provinsi Jambi</p>	<p>Hasil penelitian diperoleh jika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1%, maka upah minimum akan menghasilkan peningkatan sebesar 2.538%. Sementara variabel inflasi sebesar - 0,202. Ini berarti bahwa apabila terjadi kenaikan inflasi sebesar 1% akan mengakibatkan nilai upah minimum menurun sebesar 0,202%. variabel bebas (pertumbuhan ekonomi dan inflasi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum jambi. Berdasarkan uji parsial (uji t), variabel pertumbuhan ekonomi positif dan signifikan berpengaruh terhadap upah minimum provinsi Jambi, variabel inflasi tidak signifikan dan bernilai negatif koefisien. Fakta ini, mengindikasikan inflasi dapat menurunkan nilai uang yang</p>

			diterima oleh para pekerja. Karena meskipun nilai nominal upah minimum provinsi akan meningkat tetapi nilai barangnya daya beli pekerja akan menurun, akibatnya kebutuhan hidup kerja sehari-hari tidak ada bertemu.
54.	<p>Florin Teodor BOLDEANU, Liliana CONSTANTINESCU</p> <p>Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series V: Economic Sciences • Vol. 8 (57) No. 2 - 2015</p>	<p><i>The Main Determinants Affecting Economic Growth</i></p> 	<p>Hasil penelitian mencoba menawarkan sudut pandang kami dalam evolusi faktor-faktor utama yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Masih belum ada konsensus tentang faktor penentu utama pertumbuhan dan model yang mencakup semua yang mencakup semua pengaruh belum diuraikan.</p>
6.	<p>Mohammad Bintang P Nurizal Ismail dan Indra Eksyar, Volume 02, Nomor 02, November 2015: 512-534</p>	<p><i>Determinan Indeks Pembangunan Manusia : Analisa Pendekatan Maqashid Syariah Al-Ghazali (Studi Kasus : Negara-Negara OKI)</i></p>	<p>Studi menunjukkan bahwa <i>Ḥifz ‘Aql</i> (Intelektual) dan <i>Ḥifz Māl</i> (Kekayaan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap HDI. Di sisi lain, <i>Ḥifz Nafs</i> (Kehidupan) <i>Ḥifz Nasl</i> (Keturunan) berpengaruh signifikan terhadap HDI. Hal ini mungkin karena kualitas Sumber Daya Manusia dan Birokrasi di Beberapa Negara OKI. Sementara itu, teori <i>Maqāsid Syarī’ah</i> telah berkembang dengan baik dalam Human Development namun masih memiliki banyak poin untuk dievaluasi.</p>
7.	<p>Yesika Resianna Barimbing, Ni Luh Karmini</p> <p>E-JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS UDAYANA Vol. 4, No. 5, Mei 2015</p>	<p>Pengaruh PAD, Tenaga Kerja, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Bali</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan PAD, tenaga kerja, dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali. Secara parsial PAD dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di</p>

			Provinsi Bali, sedangkan investasi tidak berpengaruh signifikan.
8.	<p>Aurora A.C.Teixeira and Anabela S.S.Queirós</p> <p>Research Policy, Volume 45, Issue 8, October 2016, Pages 1636-1648</p>	<p><i>Economic growth, human capital and structural change : A dynamic panel data analysis</i></p>	<p>Human capital diidentifikasi sebagai salah satu determinan utama terhadap pertumbuhan ekonomi dan memiliki peran yang sangat krusial dalam perkembangan teknologi. Berdasarkan hasil estimasi dari dynamic panel data, human capital dan productive specialization merupakan variabel yang sangat krusial terhadap pertumbuhan ekonomi.</p>
9.	<p>Zheng Fang and Youngho Chang, Energy Economics Volume 56, May 2016, Pages 177-184</p>	<p><i>Energy, human capital and economic growth in Asia Pacific countries—Evidence from a panel cointegration and causality analysis</i></p>	<p>Penelitian ini menggunakan developed panel unit root test dan cointegration test untuk menginvestigasi cointegration dan causal relationship antara Konsumsi energy, human capital dan pertumbuhan ekonomi di 16 negara Asia Pacific pada periode 1970–2011. Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat cointegrating relationship antara variabel yang diteliti.</p>
10.	<p>Ade Irma Safitri, Jaka Sriyana</p> <p>Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, 2016</p>	<p>Analisis Pertumbuhan Ekonomi Serta Peran Perbankan Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Asean</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan hanya terdapat 2 variabel yaitu IPM dan FDI yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, selain itu, dalam hasil penelitian juga ditemukan bahwa pembiayaan perbankan syariah tidak berpengaruh secara signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di 4 negara islam di ASEAN. Masing-masing negara diharapkan terus bekerja sama dengan negara lain dan meningkatkan kualitas.</p>

11.	Chandra Kurniawan Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 12, No.4, Januari 2016	Pengaruh Investasi Terhadap Perekonomian Indonesia 	Pertumbuhan ekonomi pada zaman sekarang ini berdampak pada kehidupan penduduk suatu lokal. Semuanya ini berpengaruh pada kesejahteraan rakyat banyak. Penguatan peran dan kelembagaan pemerintah sangat penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan investasi. Daya tarik investasi bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan kepastian lokal, meningkatkan diversifikasi pasar dan mendorong komoditi lokal yang bernilai tambah tinggi
12.	Djumadi Tahkim Vol. XII, No. 1, Juni 2016	Konsep Pembangunan Ekonomi Persepektif Islam	Hasil interprestasi menunjukkan, bahwa pesan al-Qur'an tentang pembangunan ekonomi perspektif Islam belum banyak mendapat perhatian terutama pada negara-negara Islam. Salah satu indikator pembangunan yang dijelaskan adalah tingkat ketimpangan dan kemiskinan yang melanda berbagai Negara Sedang Berkembang. Beberapa solusi yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) kurangi belanja rutin, dan menambah kuantitas fiskal; (2) pembangunan ekonomi lebih diarahkan pada peningkatan kualitas pembangunan dipedesaan; (3) ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan SDM sektor pertanian.
13.	Andria Zulfa Jurnal Visioner & Strategis, Volume 5, Nomor 1, (Maret 2016)	Pengaruh pertumbuhan Penduduk & Pertumbuhan Ekonomi terhadap	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa pertumbuhan

		<p>Tingkat Pengangguran di Kota Lhokseumawe</p> 	<p>penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Kota Lhokseumawe.</p> <p>2. Tingkat keeratan hubungan antara variabel pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran adalah 84,5% dikategorikan hubungannya kuat.</p> <p>3. Nilai dari koefisien determinan sebesar 0.714 ($R^2 = 71,4\%$) yang berarti bahwa pengangguran dijelaskan oleh pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi 71,4%. Sedangkan sisanya sebesar 28,6% dijelaskan oleh variabel diluar dipenelitian ini</p>
14.	<p>Rizky Dwi Cahyo Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, Malang (2016)</p>	<p>Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Rata-Rata Lama Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur Tahun 2009-2014</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan Upah minimum berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka sedangkan rata-rata lama pendidikan berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur.</p>
15.	<p>Serhat Yüksel dan İsmail Canöz. IKONOMIKA: Journal of Islamic Economics and Business Volume 2, No 1 (2017)</p>	<p><i>Does Islamic Banking Contribute to Economic Growth and Industrial Development in Turkey?</i></p>	<p>Penelitian di Turki, bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian dan signifikan. Alasan utama atas hasil ini ialah masih kecilnya persentase perbankan syariah pada perbankan. Mereka menyarankan agar meningkatkan perbankan syariah agar bisa berkontribusi lebih dalam perekonomian signifikan itu. Hal ini serupa</p>

			dengan temuan peneliti bahwa pembiayaan untuk noninvestasi dari perbankan syariah justru mengurangi pertumbuhan ekonomi.
16.	Anton Sudrajat dan Amirus Sodiq Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol. 5 No. 1 Juni 2017	Pengaruh Pembiayaan Produktif dan konsumtif Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2013-2017	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pembiayaan produktif perbankan syariah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2013-2017; Pembiayaan konsumtif perbankan syariah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2013-2017; Pembiayaan produktif, konsumtif perbankan syariah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi sebesar 91,3%.
17.	Aditya Kurniawan, Hendry Cahyono Volume 5 No 2 edisi Yudisium 2017	Pengaruh Investasi Langsung dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pendapatan Perkapita Indonesia	Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Variabel investasi asing langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan per kapita. 2. Variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan per kapita. 3. Variabel investasi asing langsung dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel pendapatan per kapita.
18.	Azwar Iskandar Umar Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 20, Nomor 1, Juli 2017	<i>Index of Syariah fInancIal Inclusion In Indonesia</i>	Bahwa Indeks Inklusi Keuangan Syariah secara umum rendah dan Bangka Belitung merupakan provinsi yang paling inklusif secara finansial di Indonesia. Selanjutnya, hasil

			menunjukkan bahwa Indeks Inklusi Keuangan Syariah berkorelasi positif dengan Indeks Pembangunan Manusia. Kesimpulan ini menyarankan promosi Inklusi Keuangan Syariah menjadi prioritas kebijakan di Indonesia untuk mencapai tujuan utama pertumbuhan inklusif, kesejahteraan dan pembangunan ekonomi.
19.	Chima Chidi Iloabuchi IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF) e-ISSN: 2321-5933, p-ISSN: 2321-5925. Volume 10, Issue 3 Ser. I (May. – June 2019), PP 82-89	<i>Analysis of the Effect of Unemployment on the Economic Growth of Nigeria</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan uji kausalitas Granger menunjukkan hubungan searah antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi Nigeria. Hasil pertumbuhan penduduk yang juga dimasukkan dalam model sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Hubungan linear pertumbuhan penduduk tersebut menandakan bahwa pemerintah harus mendorong angka kelahiran dengan kualitas pendidikan yang kuat dan pembangunan sumber daya manusia. Studi ini merekomendasikan penyediaan pembangunan di sektor ekonomi lain yang benar-benar akan mendiversifikasi ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi kaum muda yang menganggur di Nigeria.
20.	Ming Zhang, Xiaorong Zou, dan Long Sha. Journal of Sustainability. Ww.mdpi.com/jurnal/sustainability 2019. 11, 662; doi: 10.3390/su11030662	<i>Sosial Security and Sustainable Economic Growth: Based on the perspective of Human Capital.</i>	Berdasarkan data panel provinsi China selama periode 2007-2016, (2019) menganalisis model ambang dan menemukan bahwa dampak jaminan signifikan terhadap produktivitas memiliki “ambang ganda” pada modal manusia. Menggunakan model dan

			<p>panel data panel dinamis, penduga General Moment Method juga menemukan adanya efek ambang ini: Ketika tingkat modal manusia rendah atau tinggi, jaminan menguntungkan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, jika tingkat modal manusia berada pada tingkat menengah, fungsi jaminan lemah. Kesimpulan utama masih valid setelah kami memeriksa ketahanan hasil kami dengan beberapa metode lain.</p>
21.	<p>Alotaibi Mohamed Meteb.</p> <p>Internasional Journal of Economics and Finance; vol 9. No. 9; Published by Canadian Center of Science and Education.</p>	<p><i>Unemplymnet and Economic Growth ini Saudi Arabia</i></p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara ketenagakerjaan dan pendapatan riil, investasi riil, pengeluaran pemerintah riil, dan nilai riil ekspor. Di sisi lain, ada hubungan signifikan antara ketenagakerjaan dan nilai riil impor. Pertumbuhan ekonomi tidak memadai dalam mengurangi tingkat pengangguran. Ada hubungan timbal balik antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang tidak bekerja secara efektif di ekonomi Saudi. Saudi lebih suka bekerja dengan pemerintah bukan di sektor swasta. Disarankan Pemerintah harus merangsang bekerja disektor swasta.</p>
22.	<p>Victoria Kenny S. MPRA</p> <p>Paper No. 93133, posted S. April 2019 03.53 UTC</p>	<p><i>A Causal Relationship between Unemployment and Economic Growth.</i></p>	<p>Studi di Nigeria yang dilakukan Victoria Kenny S ini mengadopsi pendekatan VAR Granger Causality untuk memeriksa arah hubungan antara pengangguran (UNEMP) dan tingkat pertumbuhan ekonomi (RGDP) yang mencakup periode. Temuan kunci</p>

			<p>mengungkapkan hubungan searah VAR antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, menyiratkan bahwa tingkat kegiatan ekonomi tidak mengganggu menyebabkan tingkat pengangguran di Nigeria. Oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan kelangsungan hidup perusahaan skala kecil dan menengah yang dapat membantu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan menyebabkan pertumbuhan output riil yang berkelanjutan, selanjutnya diharapkan menghasilkan peningkatan tingkat penciptaan lapangan kerja dalam perekonomian.</p>
23.	<p>Risnawati Junaidin Zakaria Muchlis Sufri CESJ : Center of Economic Student Journal. Vol. 2. No. 3 Juli (2019)</p>	<p>Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Barat</p>	<p>Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Inflasi, tenaga kerja dan investasi berhubungan secara parsial dan simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. Hasil penelitian ini menyarankan kepada pemerintah agar dapat meningkatkan investasi dalam negeri sehingga dapat meningkatkan berinvestasi yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang positif. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menarik investasi asing dengan cara menciptakan iklim investasi yang kondusif, penyederhanaan proses perijinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga diharapkan investasi dapat semakin meningkat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. Hal lain yang</p>

			<p>harus dilakukan adalah meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang, serta lebih meningkatkan peraturan yang konsisten dalam berinvestasi, sehingga kepastian dan keamanan untuk berinvestasi lebih terjamin.</p>
24.	<p>Henty Eka Palupy Maruto Umar Basuki DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019, Halaman 68</p>	<p>Analisis Pengaruh Investasi dan Budget Deficit Terhadap Pertumbuhan di Indonesia</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel investasi signifikan dan budget deficit memiliki pola hubungan kausalitas dua arah terhadap pertumbuhan ekonomi. Lain halnya dengan hasil uji kausalitas Granger pada FDI terhadap pertumbuhan ekonomi yang hanya terjadi pola kausalitas satu arah dimana tingkat FDI mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil estimasi VECM menunjukkan dalam jangka pendek variabel investasi signifikan dan budget deficit berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada lag ketiga dimana kenaikan pada investasi signifikan dan budget deficit pada periode tiga sebelumnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada periode berjalan. Sedangkan FDI menunjukkan pada lag kedua berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang artinya perubahan FDI pada periode kedua sebelumnya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi berubah pada periode berjalan. Selanjutnya pada hasil estimasi jangka panjang menunjukkan investasi signifikan, FDI dan budget deficit berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan</p>

			<p>ekonomi. Namun arah pengaruhnya menyebutkan bahwa investasi dan budget deficit berpengaruh signifikan dimana peningkatan dari dua variabel tersebut menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Analisa kontribusi variabel investasi signifikan, FDI dan budget deficit terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki kontribusi utama dalam mempengaruhi dirinya sendiri.</p>
25.	<p>Syamsu Nujum, Zainuddin Rahman Economic Resources Vol. 1 No. 2 Maret 2019</p>	<p>Pengaruh Investasi dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Investasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar dan Inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar</p>
26.	<p>Reni Mustika Putri, Karjadi Mintaroem Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 7 Juli 2019</p>	<p><i>Determinan Islamic Human Development Index (IHDI) Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2016</i></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah, dan penyaluran ZIS pada IHDI di Jawa Timur tahun 2001-2016. Dengan pendekatan kuantitatif menggunakan Ordinary Least Square (OLS) untuk melihat elastisitas variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil menunjukkan bahwa tiga dari empat variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap IHDI, yaitu: pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, dan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan. Variabel zakat, infaq, sadaqah berpengaruh tidak signifikan terhadap IHDI</p>

27.	<p>Hasymi Nur Baehaqy dan Eko Fajar Cahyono</p> <p>Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 6 Juni 2019: 1272-1286</p>	<p>Pengaruh Pembiayaan Perbankan Konvensional, Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Pada Tahun 2008-2018</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan satu arah pada beberapa variabel yaitu Pembiayaan Perbankan Konvensional terhadap PDB dan Pembiayaan Perbankan Konvensional terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah, Dalam jangka panjang Pembiayaan Perbankan Konvensional memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap PDB, sedangkan Pembiayaan Perbankan Syariah memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap PDB</p>
28.	<p>Sodik Dwi Purnomo, Istiqomah</p> <p>Journal of Economics and Policy, Jejak Vol 12 (1) (2019): 238-252</p>	<p><i>Economic Growth and Poverty: The Mediating Effect of Employment</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesempatan kerja secara sempurna memediasi hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Studi ini juga menemukan bahwa rasio ketergantungan dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan infrastruktur berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Efek mediasi sempurna menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kemiskinan hanya jika pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja. Temuan ini menyiratkan pentingnya pertumbuhan inklusif yang memberikan akses kepada masyarakat miskin untuk bekerja dan peluang usaha.</p>
29.	<p>Ruhma Khan, Imran Sharif Chaudhry</p> <p>Review of Economics and Development Studies</p>	<p><i>Impact of Human Capital on Employment and Economic Growth in</i></p>	<p>Dengan menggunakan model fixed effect dan random effect yang digunakan dalam penelitian ini, hasil empiris</p>

	ISSN:2519-9692 ISSN (E): 2519-9706 Volume 5: No. 3, 2019	<i>Developing Countries</i>	menunjukkan bahwa variabel modal manusia (harapan hidup dan pengeluaran pendidikan) ditemukan signifikan dan karenanya berkontribusi sebagai mesin pertumbuhan dan kesempatan kerja di negara berkembang.
30.	Wisnu Satria, Muhammad Syahrul Mubarak International Summit on Science Technology and Humanity (ISETH2019) Advancing Scientific Thought for Future Sustainable Development	<i>The Effect of Economic Growth and Wage on Employment Opportunities at Samarinda City</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kesempatan kerja di Kota Samarinda Kalimantan Timur dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2015. Berdasarkan data yang dianalisis dalam penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Kesempatan Kerja di Kota Samarinda dan Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesempatan Kerja di Kota Samarinda
31.	Kusuma Ratnawati Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 7 No 10 (2020) 073– 085	<i>The Impact of Financial Inclusion on Economic Growth, Poverty, Income Inequality, and Financial Stability in Asia</i>	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa seluruh dimensi stabilitas keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan stabilitas keuangan. Dampak parsial dimensi inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan stabilitas keuangan di sepuluh negara Asia belum optimal dapat tercapai.

32.	<p>Hala Hjazeen, Mehdi Seraj, and Huseyin Ozdeser</p> <p>Hjazeen et al. <i>Futur Bus J</i> 2021, 7(1):42</p>	<p><i>The nexus between the economic growth and unemployment in Jordan</i></p>	<p>Temuan empiris menunjukkan hubungan jangka panjang antara tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, populasi wanita, dan populasi perkotaan di Yordania. Temuan kami menunjukkan hubungan negatife antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, dan hubungan positif antara pendidikan, penduduk perempuan, dan penduduk perkotaan dan pengangguran di Yordania.</p>
34.	<p>Ross Levine</p> <p>IMF Working Paper, 2021 International Monetary Fund, Authorized for distribution by Johannes Wiegand June 2021</p>	<p><i>Strategy, Policy and Review Department Finance, Growth, and Inequality Prepared by Ross Levine</i></p>	<p>Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) perkembangan keuangan baik, perkembangan bank maupun pasar saham memacu pertumbuhan ekonomi dan (2) sistem keuangan yang berfungsi lebih baik mendorong pertumbuhan terutama dengan meningkatkan alokasi sumber daya dan perubahan teknologi, bukan dengan meningkatkan tingkat tabungan. Penelitian juga menunjukkan bahwa pembangunan keuangan memperluas peluang ekonomi dan memperketat distribusi pendapatan, terutama dengan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin</p>
35.	<p>Hugo Aries Suprpto, et.al</p> <p>International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Peer Reviewed – International Journal Vol-6, Issue-1, 2022 (IJEBAR) E-ISSN: 2614-1280 P-ISSN 2622-4771</p>	<p><i>The Effect Of Investment On Economic Growth And Human Development Index And Community Welfare (Case Study in Bekasi Regency)</i></p>	<p>Jika dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian explanatory research yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel dalam pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi (X1) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1). Begitu juga</p>

			<p>untuk indeks pertumbuhan manusia (IPM), investasi berpengaruh signifikan terhadap IPM (Y2). Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan pertumbuhan ekonomi (Y1) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan (Y3). Pertumbuhan ekonomi (Y1) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan (Y3)</p>
--	--	--	---

Hasil kajian dan literatur yang berkaitan dengan penelitian terdahulu disimpulkan beberapa perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini, yaitu :

1. *Grand theory* yang digunakan *Maqashid Syariah* dan Pembangunan Manusia, dengan indikator penunjang *Islamic Human Development Index* (IHDI) yang berbeda serta metode penghitungan dalam *Human Development Index* (HDI) sudah menerapkan metode yang terbaru (*update*) dibandingkan dengan penelitian terdahulu.
2. Penggunaan data panel pada seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 33 kabupaten/ kota merupakan pengembangan dari metode penghitungan peneliti sebelumnya.
3. Nilai *Islamic Human Development Index* (IHDI) yang didapatkan bersama-sama dengan variabel lain yang secara umum proxy dari keberhasilan pembangunan, seperti *Human Development Index* (HDI), pembiayaan perbankan serta investasi dengan variabel Pertumbuhan Ekonomi yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai variabel *Intervening* untuk mengetahui apakah variabel tersebut menjadi penggerak/ pendorong bagi penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah pekerja pada kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Utara.

G. Keterkaitan Antar Variabel

1. Pengaruh Investasi, Pembiayaan Perbankan dan *Islamic Human Development Index* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam GNP dan dalam permintaan agregat, karena pengeluaran investasi lebih tidak stabil apabila dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi sehingga fluktuasi investasi dapat menyebabkan resesi. Disamping itu, investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta perbaikan dalam produktivitas tenaga kerja. (Syukri & Hinaya, 2019).

Indikator pembiayaan perbankan merupakan indikator yang juga dapat menentukan perekonomian, terdapat korelasi antara pembiayaan perbankan dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Pernyataan ini juga diperkuat dengan Abduh (2012), dimana terdapat hubungan kausalitas dua arah antara pembiayaan perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi. (Syahputra & Ningsih, 2020).

Sedangkan, IHDI sebagai proxy dari kualitas sumber daya manusia secara Islami, menjelaskan bahwa rasionalitas ekonomi syari'ah dilandaskan dalam prinsip keadilan yang memiliki unsur persamaan, pemerataan dan keseimbangan manfaat dari prinsip-prinsip ekonomi. Selain itu, berdasarkan penilaian akal yang merupakan karunia utama Tuhan pada makhluk-Nya, sehingga aktifitas perekonomian harus berkembang dan menghormati akal dan sebagai modalnya. (Rahardo, 2013)

Hal ini sesuai dan sejalan dengan penelitian oleh (Ioan, 2014); (Datuk, 2014); (Chalid & Yusuf, 2014); (Barimbing & Karmini, 2015); (Sudrajat et al., 2017); (Arifin & Putra, 2020); (Risnawati, 2019); (Nujum & Rahman, 2019); (Khan et al., 2019); (Satria & Mubarak, 1999); (Setiawan, 2020); (Suprpto et al., 2022).

Beberapa hasil penelitian yang tidak sejalan diantaranya adalah (Safitri & Sriyana, 2016); (Kurniawan & Cahyono, 2017) yang menyatakan bahwa

pembiayaan perbankan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah tingkat pengangguran. (Todaro, 2008).

Sebaliknya, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya.

Jadi, ketika perekonomian daerah mengalami peningkatan, artinya tenaga kerja akan banyak terserap dan secara otomatis akan menurunkan tingkat pengangguran. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian oleh (Ioan, 2014); (Chalid & Yusuf, 2014); (Barimbing & Karmini, 2015); (Barimbing & Karmini, 2015); (Kurniawan & Cahyono, 2017); (Risnawati, 2019); (Purnomo & Istiqomah, 2019); (Hjazeen et al., 2021)

Penelitian yang berbeda dijelaskan oleh (Kenny, 2019), dimana hasil penelitian mengungkapkan hubungan searah antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, menyiratkan bahwa tingkat kegiatan ekonomi tidak mengganggu menyebabkan tingkat pengangguran.

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Pekerja

Beberapa penelitian menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi juga berkaitan erat dengan penetapan upah minimum regional. Ketika suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka akan berdampak pada penetapan upah minimum yang juga mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan penelitian Sulistiawati (2012:199), yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat diharapkan akan terwujud apabila pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan meningkatkan lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak pada tingkat upah yang layak.

Korelasi antara laju pertumbuhan ekonomi dengan upah adalah linier dan searah, yang berarti ketika kondisi perekonomian mengalami peningkatan maka tingkat upah pekerja akan membaik dan mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Charysa, 2013); (Chalid & Yusuf, 2014); (Satria & Mubarak, 1999); (MS, 2014); (Dahlia Tsalsalaila, et al, 2022); (Amelia, 2021)

4. Pengaruh Investasi, Pembiayaan Perbankan dan *Islamic Human Development Index* Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Melalui Pertumbuhan ekonomi

Pengaruh secara parsial antara investasi, Pembiayaan Perbankan dan *Islamic Human Development Index* Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka adalah negatif dan signifikan, sedangkan secara simultan pengaruh variabel-variabel tersebut juga menunjukkan pengaruh yang terbalik atau negatif.

Investasi secara parsial akan berdampak negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, demikian juga dengan lembaga keuangan yang diproksi dari pembiayaan perbankan serta *Islamic Human Development Index*, sedangkan secara simultan pengaruh Investasi, pembiayaan perbankan dan *Islamic Human Development Index* berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Hal ini mengandung arti, bahwa ketika Investasi, pembiayaan perbankan dan *Islamic Human Development Index*

mengalami peningkatan maka Tingkat Pengangguran Terbuka akan mengalami penurunan, demikian sebaliknya, jika Investasi, pembiayaan perbankan dan *Islamic Human Development Index* mengalami penurunan, maka Tingkat Pengangguran Terbuka akan mengalami peningkatan.

Secara spesifik pengaruh variabel-variabel yang digunakan sejalan dengan penelitian oleh (Ioan, 2014); (Datuk, 2014); (Chalid & Yusuf, 2014); (Barimbing & Karmini, 2015); (Sudrajat et al., 2017); (Arifin & Putra, 2020); (Risnawati, 2019); (Nujum & Rahman, 2019); (Khan et al., 2019); (Satria & Mubarak, 1999); (Setiawan, 2020); (Suprpto et al., 2022).

5. Pengaruh Investasi, Pembiayaan Perbankan dan *Islamic Human Development Index* Terhadap Upah Melalui Pertumbuhan ekonomi

Pengaruh secara parsial antara investasi, Pembiayaan Perbankan dan *Islamic Human Development Index* terhadap upah pekerja adalah positif dan signifikan, sedangkan secara simultan pengaruh variabel-variabel tersebut juga menunjukkan pengaruh yang searah dan linier.

Investasi secara parsial akan berdampak positif dan signifikan terhadap upah pekerja, demikian juga dengan lembaga keuangan yang diproksi dari pembiayaan perbankan serta *Islamic Human Development Index*, sedangkan secara simultan pengaruh Investasi, pembiayaan perbankan dan *Islamic Human Development Index* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap upah.

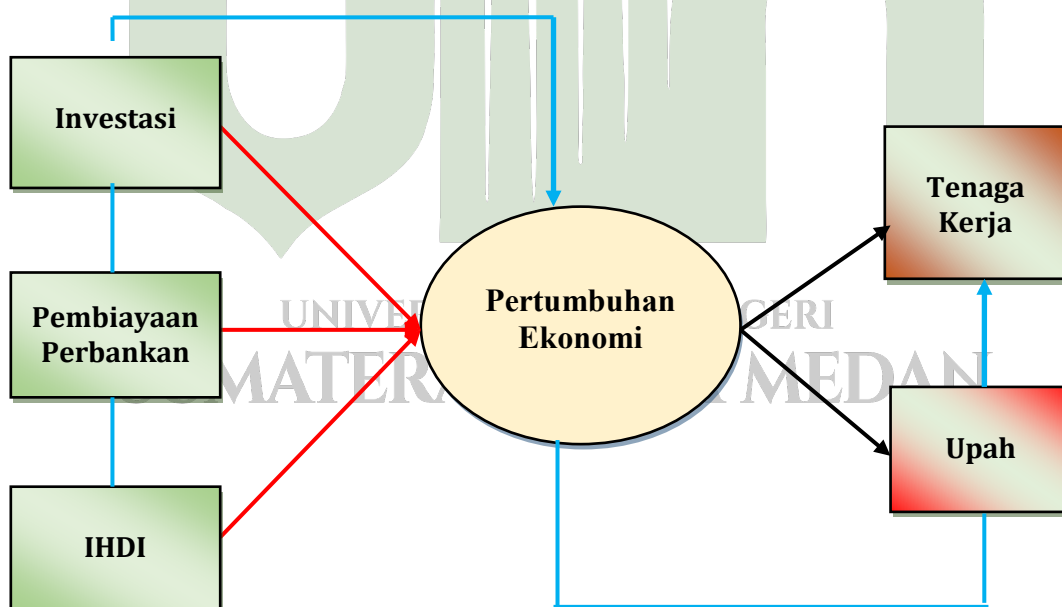
Secara spesifik pengaruh variabel-variabel yang digunakan sejalan dengan penelitian oleh (Sudrajat et al., 2017); (Arifin & Putra, 2020); (Risnawati, 2019); (Nujum & Rahman, 2019); (Khan et al., 2019); (Satria & Mubarak, 1999); (Setiawan, 2020); (Suprpto et al., 2022); (Charysa, 2013); (Chalid & Yusuf, 2014); (Satria & Mubarak, 1999); (MS, 2014); (Dahlia Tsalsalaila, et al, 2022); (Amelia, 2021)

H. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan alur berpikir dalam mengembangkan dan merumuskan tujuan dari penelitian dalam bentuk skema/ bagan. Kerangka teoritis dalam penelitian ini, menjelaskan pengaruh langsung variabel Investasi, Pembiayaan Perbankan dan *Islamic Human Development Index* terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan juga untuk menjelaskan pengaruh variabel Investasi, Pembiayaan Perbankan dan *Islamic Human Development Index* terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah melalui Pertumbuhan Ekonomi.

Pengaruh langsung antara variabel investasi, Pembiayaan Perbankan dan *Islamic Human Development Index* terhadap Pertumbuhan Ekonomi, pengaruh langsung antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah. Sedangkan pengaruh tidak langsung adalah variabel investasi Pembiayaan Perbankan dan *Islamic Human Development Index* terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah melalui variabel Pertumbuhan Ekonomi.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini disajikan dalam Gambar 2 berikut.



Gambar 2.3. Skema Kerangka Berfikir

I. Hipotesa

Dari uraian dan penjelasan dalam teori dan hasil penelitian terdahulu, maka disusunlah hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Pengaruh Investasi, Pembiayaan Perbankan dan *Islamic Human Development Index* (IHDI) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

H_{1a} : Investasi, Pembiayaan Perbankan dan *Islamic Human Development Index* (IHDI) secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara.

2. Pengaruh Investasi, Pembiayaan Perbankan dan IHDI dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Mediasi terhadap Tenaga Kerja

H_{1a} : Investasi, Pembiayaan Perbankan dan IHDI dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Mediasi berdampak positif dan signifikan terhadap Tenaga Kerja

3. Pengaruh Investasi, Pembiayaan Perbankan dan IHDI dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Mediasi terhadap Upah

H_{1a} : Investasi, Pembiayaan Perbankan dan IHDI dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Mediasi berdampak positif dan signifikan terhadap Upah

4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tenaga Kerja.

H_{1a} : Pertumbuhan Ekonomi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara.

5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Upah.

H_{1a} : Pertumbuhan Ekonomi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara.